

**EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP  
PENGEMBANGAN EKONOMI UNTUK Mendukung  
KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : SHIHABUDDIN FUADY RANGKUTI  
NPM : 1505180069  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : SHIHABUDDIN FUADY RANGKUTI  
NPM : 1505180069  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI UNTUK Mendukung KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DI INDONESIA

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

Penguji I

(Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Penguji II

(HADRIMAN KHAIR, SP, M.Sc)

**Pembimbing**

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS)

**Ketua**

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

**Sekretaris**

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SHIHABUDDIN FUADY RANGKUTI  
NPM : 1505180069  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP  
PENGEMBANGAN EKONOMI UNTUK Mendukung  
KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DI INDONESIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Diketahui/Disetujui

oleh :

Ketua Program Studi

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS



H. JANURI, S.E, M.M, M.Si

## ABSTRAK

Dalam skripsi ini diangkat berdasarkan fenomena yang terjadi dalam laporan tahunan perekonomian Indonesia bahwasanya tidak meratanya pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan sehingga tidak meratanya tingkat kualitas hidup yang terjadi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Dana Desa di Kabupaten se-Indonesia. Serta melihat pemetaan dan kualitas pembangunan ekonomi di Kabupaten se-Indonesia Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melakukan estimasi dan membuktikan bagaimana variabel-variabel DD, PDRB per Kapita dan BD dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Indonesia. Serta melakukan pemetaan dengan Tipologi Klassen untuk melihat penyebaran pemetaan Dana Desa dengan kualitas pembangunan ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, dimana penelitian ini dihimpun sebanyak 4 tahun, yaitu mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Pengambilan data sampel menggunakan *cluster sampling* sebanyak 6 *cluster* dengan total 36 Kabupaten. Berdasarkan hasil estimasi dengan metode regresi berganda menggunakan *software E-Views 10*, diukur *goodness of fit* ( $R^2$ ) pada model pertama diperoleh nilai sebesar 99,24%. Variabel independen yaitu DD, PDRB per Kapita dan BD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten se-Indonesia. Sedangkan secara parsial variabel DD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembentukan IPM. Variabel PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembentukan IPM. Serta variabel BD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan IPM. Dalam melakukan pemetaan Tipologi Klassen menggunakan *software IBM SPSS Statistics 24*. Tipologi Klassen dilakukan berdasarkan data Dana Desa Per Provinsi, IPM Per Provinsi dan Pertumbuhan Per Provinsi.

**Kata kunci:** *Indeks Pembangunan Manusia, DD, PDRB Per Kapita, BD, Kualitas Hidup.*

## KATA PENGANTAR



Asaalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT yang memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, kesabaran, serta kekuatan dan tak lupa pula Shalawat bernadakan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: **“Evaluasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Untuk Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat Di Indonesia”**, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penelitian skripsi ini penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh penulis, namun demikian penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki masih sangat terbatas sehingga terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah membimbing penulis, baik moril, materil dan ide-ide pemikiran.

Skripsi ini dipersembahkan terkhusus kepada Ayahanda Ir. H. Wirdan Yusuf Rangkuti M.MA dan Ibunda Ir. Murniati Lubis yang telah memberikan do'a, spiritual, moral, dan materil yang tidak akan ternilai.

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya, untuk itu penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
4. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Seluruh dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada seluruh Keluarga Kecil Rangkuti (Kak Fatma, Kak Nurul, Indah, dan Rivaldo) yang telah memberi *support* dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman saya Ayub, Arief, Fathur, Fuad, Sindy, dan seluruh teman Excloser II yang telah memberi semangat dan motivasi agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman terbaik saya Suci Amelia yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan masukan kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman Keluarga Encu (Nurwa, Cindai, Topek, Dicky, Suly, Tasya, Yunus, dan Fariz Rio) yang telah menemanin saya dan mengajak berbuat kebaikan dalam masa perkuliahan ini.
10. Teman-teman seperjuangan skripsi saya Ciciw Fray, Kak Miwa, Ical Palbab, dan Suedak, serta Dillaa dan Odon yang menemanin saya bermain *game* disaat jenuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh keluarga besar Ekonomi Pembangunan UMSU dari angkatan 2015 - 2018
12. Seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu demi satu.

Seluruh bantuan yang tidak ternilai harganya ini tidak dapat saya balas satu per satu, semoga Allah SWT membalasnya sebagai amal ibadah dan akan menjadi manfaat yang sangat besar bagi kita semua, Amin.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2019

Penulis,

Shihabuddin Fuady Rangkuti

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	29
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah.....	30
1.3.1 Batasan Masalah.....	30
1.3.2 Rumusan Masalah .....	30
1.4 Tujuan Penelitian .....	30
1.5 Manfaat Penelitian .....	31
1.5.1 Manfaat Akademik.....	31
1.5.2 Manfaat Non-Akademik.....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>32</b>
2.1 Landasan Teoritis .....	32
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	32
A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik.....	33



B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes .....	39
C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik .....	41
D. Produk Domestik Bruto .....	44
2.1.2 Pembangunan Ekonomi.....	45
A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik .....	47
B. Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis.....	50
C. Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery ..	53
D. Teori Pembangunan Ekonomi Fei-Ranis .....	54
E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	56
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah.....	61
A. Teori Pengeluaran Pemerintah .....	61
B. Desentralisasi Fiskal.....	69
2.1.4 Kebijakan Dana Desa .....	70
2.2 Penelitian Terdahulu .....	75
2.3 Tahapan Penelitian .....	76
2.3.1 Kerangka Analisis Penelitian .....	76
2.3.2 Kerangka Konseptual Model.....	77
2.4 Hipotesa.....	77
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>78</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	78
3.2 Definisi Operasional.....	78
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	79
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	79
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	80

3.6 Populasi dan Sampel .....	81
3.7 Teknik Analisis Tujuan Penelitian .....	83
3.7.1 Analisis Ekonomi Deskriptif Perkembangan Kebijakan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten se-Indonesia .....	83
3.7.2 Analisis Model Ekonometrika Penelitian.....	90
3.7.3 Analisis Tipologi Klassen .....	94
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN .....</b>	<b>97</b>
4.1 Perkembangan Kebijakan Dana Desa .....	97
4.1.1 Kebijakan Otonomi Daerah.....	97
4.1.2 Kebijakan Desentralisasi Fiskal .....	101
4.1.3 Analisis Perkembangan Transfer ke Daerah pada APBN ...	103
4.1.4 Analisis Perkembangan Dana Desa.....	106
4.2 Analisis Model Ekonometrika Penelitian.....	130
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	130
4.2.2 Hasil Analisis Regresi .....	132
4.3 Analisis Tipologi Klassen.....	141
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>145</b>
5.1 Kesimpulan.....	145
5.2 Saran.....	146

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia se-ASEAN Tahun 2015 ..... 13
Tabel 1.2	Perbandingan APBN 2017 dan APBN 2018 ..... 18
Tabel 1.3	Dana Desa per Pulau di Indonesia Tahun 2017 ..... 24
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu ..... 81
Tabel 3.1	Definisi Operasional ..... 85
Tabel 3.2	Pembagian Kabupaten per Pulau di Indonesia Dengan Menggunakan <i>Cluster Sampling</i> ..... 90
Tabel 3.3	Tipologi Klassen ..... 105
Tabel 4.1	Besaran Transfer ke Daerah Tahun 2001-2010 ..... 105
Tabel 4.2	Realisasi Pengeluaran Negara Tahun 2014-2018 ..... 108
Tabel 4.3	Rekapitulasi Dana Desa Tingkat Provinsi 2015-2018 ..... 116
Tabel 4.4	Pertumbuhan Dana Desa per Provinsi Tahun 2016-2019 ..... 119
Tabel 4.5	Pembagian Kabupaten per Pulau di Indonesia Berdasarkan <i>Cluster sampling</i> ..... 121
Tabel 4.6	Rincian Dana Desa Per Kabupaten Se-Indonesia Berdasarkan Teknik <i>Sampling Cluster</i> ..... 123
Tabel 4.7	Rincian Pertumbuhan Dana Desa Per Kabupaten Se-Indonesia Berdasarkan Teknik <i>Sampling Cluster</i> ..... 126
Tabel 4.8	Statistik Deskriptif Model ..... 131
Tabel 4.9	Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi ..... 132
Tabel 4.10	Tipologi Daerah Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Dana

	Desa Tahun 2015.....	143
Tabel 4.11	Tipologi Daerah Berdasarkan Dana Desa dengan IPM 2018.....	145

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1	Rata-Rata Pertumbuhan PDB di Dunia Tahun 2005-2015 .....3
Gambar 1.2	Persentase Penduduk Miskin Pedesaan dan Perkotaan ..... 11
Gambar 1.3	Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018..... 17
Gambar 1.4	Perbandingan Transfer ke Daerah Tahun 2005-2016 ..... 22
Gambar 1.5	Transfer ke Daerah dan Dana Desa..... 23
Gambar 1.6	Perkembangan Dana Desa Tahun 2015 – 2018 ..... 25
Gambar 2.1	Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah ..... 66
Gambar 2.2	Kurva Peacock dan Wiseman..... 68
Gambar 2.3	Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave ..... 69
Gambar 2.4	Kerangka Analisis Penelitian ..... 82
Gambar 2.5	Bagan Konseptual Model..... 82
Gambar 3.1	Grafik Kriteria Pengujian Hipotesis Kurva t..... 96
Gambar 3.2	Grafik Kriteria Pengujian Hipotesis Kurva F..... 98
Gambar 4.1	Perkembangan Dana Desa 2015-2018 ..... 111
Gambar 4.2	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2018..... 113
Gambar 4.3	Pemanfaatan Dana Desa ..... 114



Gambar 4.4	<i>Scatterplot Model</i> .....	139
Gambar 4.5	Tipologi Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Desa .....	140
Gambar 4.6	Tipologi Klassen Dana Desa dan IPM .....	143

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami dunia semenjak dua abad belakangan ini. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. (Todaro & Smith, 2011)

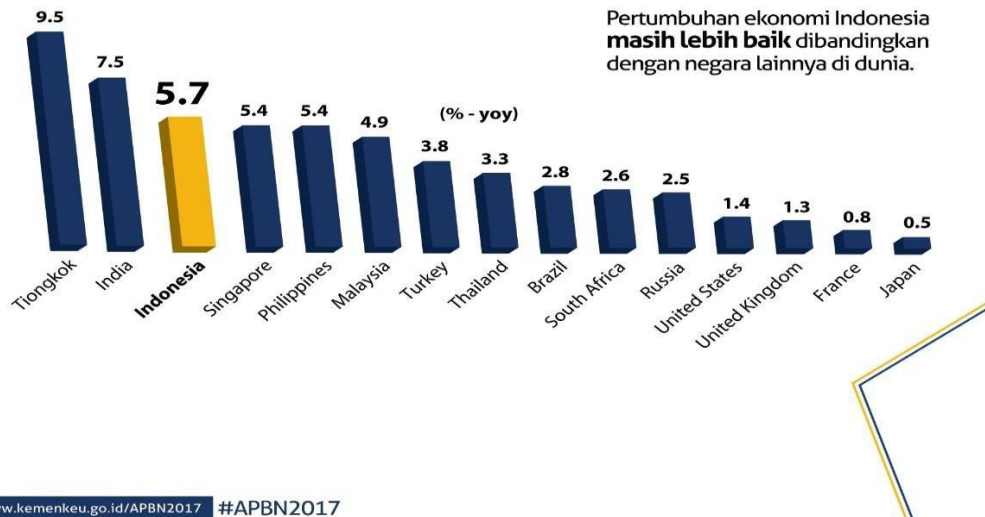
Pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Sebab, tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan. Negara dapat dikatakan sejahtera jika output perkapita meningkat. Dalam literatur ekonomi makro, tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan PDB per kapita. Makin tinggi PDB per kapita, makin sejahtera masyarakat. Agar PDB per kapita terus meningkat maka perekonomian harus terus tumbuh dan harus lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk.

Dalam pengertian secara tradisional, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional; serta percepatan pertumbuhan,

pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya, pembangunan haruslah mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok-kelompok sosial dalam sistem itu (Todaro & Smith, 2011).

Pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan bangsa agar dapat pula meningkatkan pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi, akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual (Prok, 2015).

Kabar baiknya adalah Indonesia tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan masih lebih baik yaitu mencapai 5,7 % dibandingkan dengan Negara – negara lainnya seperti Singapore, Phillipines, Turkey, Malaysia, Brazil, Afrika Selatan, Amerika Selatan, maupun Jepang yang hanya memiliki rata – rata pertumbuhan sebesar 0,5 % selama kurun waktu 2006-2015. Sementara itu, sampai dengan kuartal 3 tahun 2016, Indonesia memiliki capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sebesar 5,02% ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))



**Gambar 1.1 Rata-rata Pertumbuhan PDB di Dunia Tahun 2006 - 2015**

Sumber: Kementerian Keuangan RI ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi ialah perubahan pendapatan nasional riil. Negara yang dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasional riilnya naik dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional riil yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) yang berlaku dari tahun ke tahun.

Menurut Hollis B. Chenery (Todaro & Smith, 2011), Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional

menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita.

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi yang lebih penting dari pertumbuhan ekonomi adalah faktor komponen yang mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut juga harus membaik dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpacu pada angka namun dampaknya harus bisa langsung dirasakan kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi seharusnya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Namun, bukan berarti pertumbuhan ekonomi menjamin kemakmuran penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan pembangunan diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat ke arah lebih baik. Ukuran keberhasilan pembangunan idealnya harus mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut, bukan segelintir kelompok atau orang saja.

Pertumbuhan ekonomi nasional mempunyai pengaruh atas struktur ekonomi daerah karena pertumbuhan nasional mempunyai pengaruh atas pertumbuhan daerah, sebab daerah merupakan bagian internal dari suatu negara. Indonesia merupakan negara kesatuan, dimana rencana pembangunan meliputi rencana nasional maupun rencana regional. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang menyebabkan prestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah menjadi lebih meningkat. Hal ini dapat



dilihat pada variabel seperti pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah sebagai proporsi sebelumnya dalam struktur perekonomian negara maupun struktur perekonomian daerah selama kurun waktu tertentu (Todaro & Smith, 2011).

Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Di beberapa negara tujuan tersebut kadang-kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan (Deininger & Pedro, 2000).

Pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan rendah. Karena pertumbuhan ekonomi bisa saja dikatakan pertumbuhan yang semu. Hal ini ditandai dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia meski pertumbuhan PDB dikatakan bagus. Masalah kemiskinan sudah sejak lama menjadi masalah bangsa Indonesia, dan hingga sekarang masalah tersebut belum menunjukkan tanda – tanda menghilang. Angka statistik terus memberikan informasi masih banyaknya penduduk miskin di Indonesia (Suliswanto, 2010).

Kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan adalah dua hal yang sedang gencar-gencarnya ditekan pertumbuhannya oleh pemerintah. Ketidakmerataan terkait erat dengan kemiskinan karena secara mendasar adalah indikator kemiskinan relatif, yaitu kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Rendahnya ketidakmerataan, atau semakin meratanya distribusi pendapatan, tentunya merupakan salah satu agenda penting pembangunan ekonomi (Arifianto & Setiyono, 2013).

Salah satu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil pembangunan menjadi sasaran yang utama. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan ketimpangan pembangunan pada setiap daerah. Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan jika tidak dapat diatasi secara hati-hati akan menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. Wilayah maju terus meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor non unggulan yang membebani (Andhiani, Erfit, & Bhakti, 2018)

Setiap negara baik negara berkembang maupun negara maju tentunya melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan atau cita-citanya yaitu meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan bangsanya. Menurut TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 menjelaskan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional dikenal dengan adanya Trilogi Pembangunan yang memiliki 3 unsur yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam melaksanakan kebijaksanaan Trilogi pembangunan itu kita harus melihat ketiga unsur Trilogi pembangunan tersebut saling mengkait dan dikembangkan secara selaras, terpadu

dan saling memperkuat. Dengan pertumbuhan ekonomi justru kita dapat melaksanakan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, dan memang pertumbuhan ekonomi juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan akan mendukung pertumbuhan ekonomi karena akan lebih besar potensi yang mendorong pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi kita tidak akan dapat melaksanakan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

*Millenium Development Goals* (MDGs) hadir yang telah disetujui oleh 189 anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada bulan September 2000. MDGs merupakan paling kuat yang menunjukkan komitmen internasional untuk kemiskinan global. Ada delapan tujuan yang telah disepakati oleh PBB yaitu: menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; memastikan kelestarian lingkungan hidup; serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Tujuan – tujuan tersebut dicanangkan secara khusus untuk dicapai pada tahun 2015. (Todaro & Smith, 2011)

Pada tanggal 25 September 2015, PBB melakukan perubahan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs) menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. SDGs terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan

pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi ([www.id.UNDP.org](http://www.id.UNDP.org))

Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan, yang dimulai dengan pernyataan bersejarah untuk mengakhiri kemiskinan di semua tempat secara permanen. Adapun 17 tujuan SDGs yaitu:

Tujuan 1 : *No Poverty* (Tanpa kemiskinan)

Tujuan 2 : *Zero Hunger* (Tanpa kelaparan)

Tujuan 3 : *Good Health and Well-being* (Kehidupan sehat dan sejahtera)

Tujuan 4 : *Quality Education* (Pendidikan berkualitas)

Tujuan 5 : *Gender Equality* (Kesetaraan gender)

Tujuan 6 : *Clean Water and Sanitation* (Air bersih dan Sanitasi layak)

Tujuan 7 : *Affordable and Clean Energy* (Energi bersih dan terjangkau)

Tujuan 8 : *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi)

Tujuan 9 : *Industry, Innovation and Infrastructure* (Industri, inovasi, dan infrastruktur)

Tujuan 10 : *Reduced Inequality* (Berkurangnya kesenjangan)

Tujuan 11 : *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan komunitas berkelanjutan)

Tujuan 12 : *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab)

Tujuan 13 : *Climate Action* (Penanganan perubahan iklim)

Tujuan 14 : *Life Below Water* (Ekosistem laut)

Tujuan 15 : *Life on Land* (Ekosistem darat)

Tujuan 16 : *Peace and Justice Strong Institutions* (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh)

Tujuan 17 : *Partnerships to achieve the Goal* (Kemitraan untuk mencapai tujuan)

Dalam tujuan SDGs di pilar ekonomi yakni mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, ulet, dan berkelanjutan ([www.id.UNDP.org](http://www.id.UNDP.org)).

Untuk memperkuat Trilogi Pembangunan maka pemerintah pada masa Soeharto mengeluarkan 8 jalur pemerataan menurut Garis – garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan papan; (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan; (3) pemerataan pembagian pendapatan; (4) pemerataan kesempatan kerja; (5) pemerataan kesempatan berusaha; (6) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; (7) pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air; dan (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. (Gilarso, 2004)

Dalam pemerintahan sekarang, pembangunan berfokus dalam membangun daerah pinggiran. Desa didorong untuk selalu melakukan inovasi dan terus melakukan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Besarnya dana transfer ke desa diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar pedesaan dan perkotaan. Namun



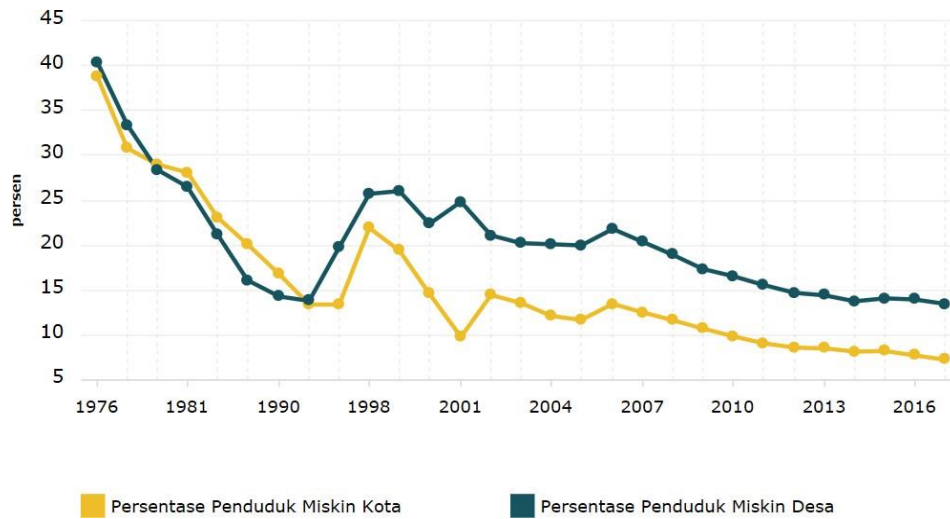
permasalahan yang masih kita lihat yaitu kesenjangan sosial ekonomi, kemiskinan, tingkat stress tinggi, penyalahgunaan lahan, pencemaran lingkungan, tingkat kesadaran masyarakat rendah, pelanggaran hukum, dan masih banyak anak putus sekolah. Untuk itu pemerintahan adalah hal yang ingin dilihat oleh semua orang dalam mengatasi masalah tersebut, maka pondasi pemerintahan itu harus menyatu, membawa tata kelola yang lebih baik hingga ke tingkat kabupaten bahkan desa.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata (Arifianto & Setiyono, 2013).

Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. (Kurniawan, 2009)

Melihat dari sejarah, tingkat kemiskinan perdesaan selalu lebih tinggi dibanding perkotaan sejak 1993. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi kemiskinan perdesaan saat itu mencapai 13,8 persen dari populasi sementara perkotaan hanya 13,4 persen. Meningkatnya industrialisasi yang banyak menciptakan lapangan kerja di kota-kota besar membuat angka kemiskinan

perkotaan lebih rendah dari perdesaan.



**Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin Pedesaan dan Perkotaan**

Sumber: BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Sedangkan pada September 2017, jumlah penduduk miskin pedesaan berkurang sekitar 970 ribu jiwa menjadi 26,58 juta jiwa sehingga proporsi kemiskinannya turun 49 basis poin (bps) menjadi 13,47 persen dari September tahun sebelumnya. Sementara jumlah penduduk miskin perkotaan menyusut sekitar 220 ribu jiwa menjadi 10,27 juta jiwa. Alhasil, persentase kemiskinan penduduk perkotaan turun 47 bps menjadi 7,26 persen. Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2017 berkurang sebanyak 1,18 juta jiwa menjadi 26,58 juta jiwa dibanding posisi September tahun sebelumnya. Sehingga tingkat kemiskinan nasional menyusut 58 bps menjadi 10,12 persen dari sebelumnya.

Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas – fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang murah akan sangat membantu untuk

meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan. (Ginting, Lubis, & Mahalli, 2008)

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam IPM terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat.

**Tabel 1.1**

**Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Se – ASEAN Tahun 2015**

Negara	Nilai IPM	Peringkat	Kelompok Pembangunan Manusia
Singapura	0,925	5	Sangat tinggi
Jepang	0,903	17	Sangat tinggi
Korea Selatan	0,901	18	Sangat tinggi
Brunei	0,865	30	Sangat tinggi
Malaysia	0,789	59	Tinggi
Thailand	0,740	87	Tinggi
Tiongkok	0,738	90	Tinggi
<b>Indonesia</b>	<b>0,689</b>	<b>113</b>	<b>Menengah</b>
Vietnam	0,683	115	Menengah
Filipina	0,682	116	Menengah
India	0,624	131	Menengah



Sumber : UNDP ([www.id.undp.org](http://www.id.undp.org))

Badan Program Pembangunan di bawah PBB (*United Nations Development Programme/UNDP*) dalam laporan Human Development Report 2016 mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2015 sebesar 0,689 berada di peringkat 113 dari 188 negara, turun dari posisi 110 di 2014. UNDP mencatat, IPM ini meningkat sekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir. Namun, di saat yang bersamaan, UNDP melihat ada sejumlah indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan IPM tersebut. Pertama, tingkat kemiskinan dan kelaparan. UNDP mencatat, ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp20 ribu per hari dan 19,4 juta orang menderita gizi buruk. Kedua, tingkat kesehatan dan kematian, tercatat sebanyak dua juta anak di bawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap. Kemudian, angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Ketiga, akses ke layanan dasar. UNDP melihat bahwa hampir lima juta anak tidak bersekolah dan anak-anak di Papua memiliki tingkat dikeluarkan dari sekolah yang tinggi.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. (Rapanna & Fajriah, 2018)

Salah satu faktor yang menentukan pembangunan nasional adalah indeks kualitas hidup. Indeks Kualitas Hidup (IKH) atau *Physical Quality of life Index*

(PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial.

Indeks ini dihitung berdasarkan kepada: (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan.

Pertambahan penduduk yang tidak terkendali akan membawa penurunan kualitas hidup manusia, seperti berakibat kekurangan pangan, kelaparan, kemiskinan, kekurangan gizi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan serta semakin meningkatnya tindak kriminalitas. Secara keseluruhan akan menurunkan sumber daya manusia. Terutama di pedesaan, masih di rasakan rendahnya tingkat pengetahuan dan pendapatan masyarakat, serta keterbelakangan dan kemiskinan.

Oleh karena itu, pada masa Presiden Republik Indonesia periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya. Membangun Indonesia dari pinggiran itu berarti desa harus dibangun karena sebagian besar penduduk Indonesia ada didesa. Masyarakat desa harus diposisikan sebagai subjek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat desa



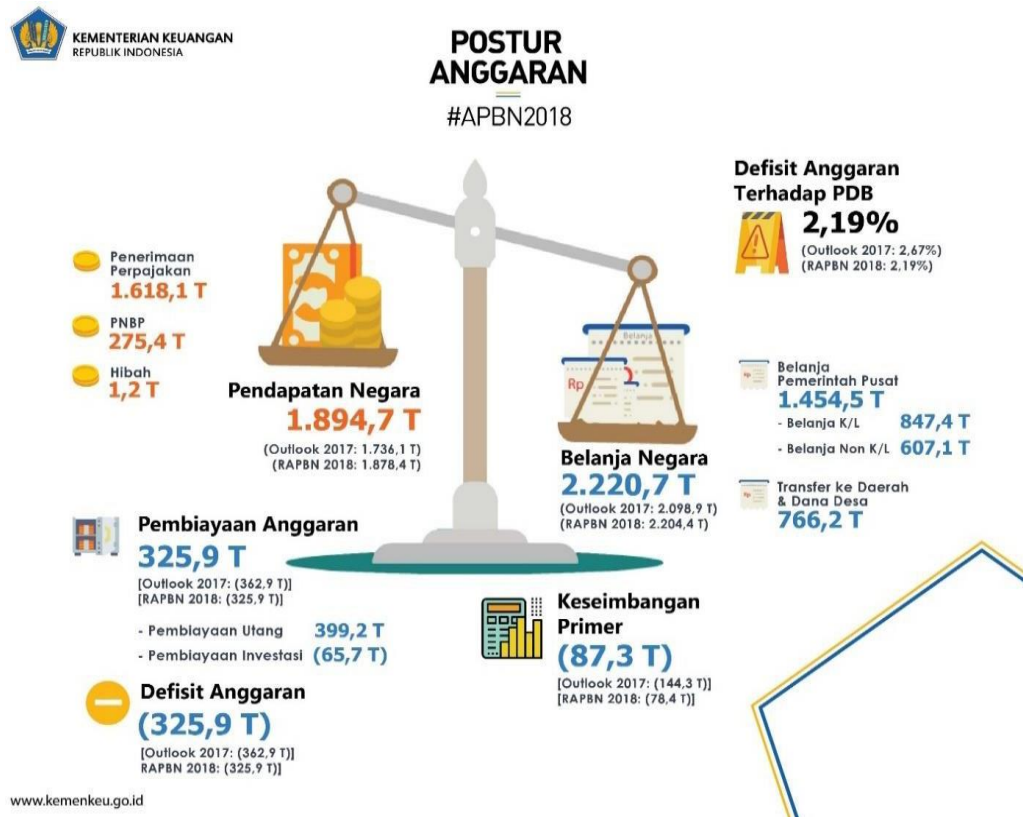
diberi kewenangan untuk dapat mendefinisikan kebutuhannya sendiri sehingga program dan kegiatan pembangunan desa harus menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat desa. Desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan di Desa. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Dana Desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan ada nya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan.

Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.



**Gambar 1.3 Postur Anggaran APBN 2018**

Sumber: Kementerian Keuangan RI ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Dalam postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun. Belanja negara dalam APBN 2018, pemerintah dan DPR RI menyepakati belanja sebesar Rp2.220,7 triliun. Besaran ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 triliun.

Pada tahun 2018, besaran pendapatan negara direncanakan mencapai

Rp1.894.720,3 miliar, yang berarti naik 9% dari targetnya pada *outlook* APBNP tahun 2017. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan mencapai Rp1.618.095,5 miliar atau naik 10 persen dari targetnya dalam *outlook* APBNP tahun 2017. Sementara itu, PNBPN ditetapkan mencapai Rp275.428,0 miliar, atau naik 5,8 persen dari targetnya dalam *outlook* APBNP tahun 2017.

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan APBN 2017 dan APBN 2018**

Uraian (triliun rupiah)	2017	2018	% thd Outlook 2017	
	Outlook	APBN		Selisih
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.736,1</b>	<b>1.894,7</b>	<b>109,1</b>	<b>158,7</b>
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.733,0	1.893,5	109,3	160,6
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472,7	1.618,1	109,9	145,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260,2	275,4	105,8	15,2
II. PENERIMAAN HIBAH	3,1	1,2	38,5	(1,9)
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2.098,9</b>	<b>2.220,7</b>	<b>105,8</b>	<b>121,7</b>
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.343,1	1.454,5	108,3	111,4
1. Belanja K/L	769,2	847,4	110,2	78,2
2. Belanja Non K/L	573,9	607,1	105,8	33,2
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	218,6	238,6	109,2	20,0
b. Subsidi	168,9	156,2	92,5	(12,6)
c. Belanja Lain-lain	56,0	67,2	120,1	11,2
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	755,9	766,2	101,4	10,3
1. Transfer ke Daerah	697,7	706,2	101,2	8,5
a.l. a. Dana Bagi Hasil	95,4	89,2	93,5	(6,2)
b. Dana Alokasi Umum	398,6	401,5	100,7	2,9
2. Dana Desa	58,2	60,0	103,1	1,8
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(144,3)</b>	<b>(87,3)</b>	<b>60,5</b>	<b>57,0</b>
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>	<b>(362,9)</b>	<b>(325,9)</b>	<b>89,8</b>	<b>36,9</b>
% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,67)	(2,19)		
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)</b>	<b>362,9</b>	<b>325,9</b>	<b>89,8</b>	<b>(36,9)</b>
I. PEMBIAYAAN UTANG	427,0	399,2	93,5	(27,8)
a.l. Surat Berharga Negara (neto)	433,0	414,5	95,7	(18,4)
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59,7)	(65,7)	109,9	(5,9)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(3,7)	(6,7)	182,4	(3,0)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,0)	(1,1)	111,5	(0,1)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	0,3	0,2	61,0	(0,1)

Sumber: Kementerian Keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Di lain pihak, dengan mengacu pada pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2018, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp2.220.657,0 miliar, naik 5,8 persen dari pagunya pada *outlook* APBNP tahun 2017. Belanja negara di tahun 2018 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat

sebesar Rp1.454.494,4 miliar, yang terdiri atas anggaran untuk belanja K/L sebesar Rp847.435,2 miliar dan belanja non K/L sebesar Rp607.059,2 miliar, serta anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp766.162,6 miliar.

Dalam struktur APBN yang berlaku saat ini, belanja pemerintah pusat menurut klasifikasi fungsi dikelompokkan menjadi 11 fungsi. Dalam APBN tahun 2018, fungsi yang memiliki porsi terbesar adalah fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi, yang masing-masing sebesar 30,0 persen dan 23,1 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 46,9 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2018 mengalami defisit anggaran sebesar Rp325.936,6 miliar atau 2,19 persen terhadap PDB, yang berarti turun dari defisit pada outlook APBN tahun 2017 sebesar 2,67 persen. Defisit RAPBN tahun 2018 tersebut ditetapkan akan dibiayai dari kombinasi pembiayaan utang dan pembiayaan non utang.

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan dan Lain-lain Pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana

transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

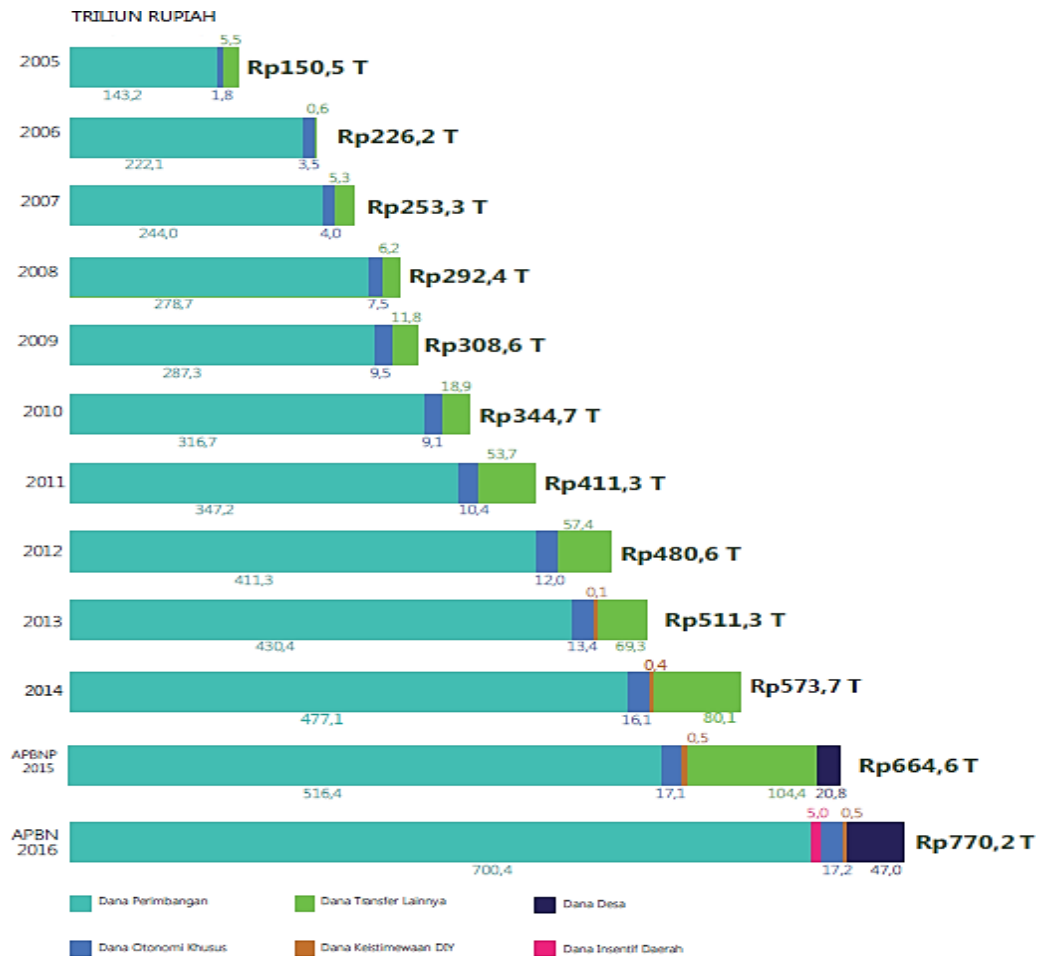
UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Pemda. Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (fiscal equalization) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Detailnya, diluar dari ketiga fungsi tersebut penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer pemerintah pusat setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Suyanto, 2009).

Pada tahun 2017, pemerintah pusat telah menganggarkan transfer ke daerah dan termasuk juga Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Transfer ke daerah mencapai Rp. 755,9 triliun meningkat dengan selisih Rp. 10,3 triliun pada tahun 2018 yaitu menjadi sebesar Rp. 766,2 triliun. Sedangkan untuk dana desa juga ikut meningkat yang awalnya hanya Rp. 5,8 triliun menjadi Rp. 60 triliun. Harapannya, dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.

Beda pemerintahan berbeda pula fokus penggunaan atau alokasi anggaran. Perbedaan itu muncul dikarenakan adanya faktor eksternal maupun perbedaan kebijakan masing – masing pemerintahan. Perbedaan fokus alokasi anggaran ini setidaknya terlihat dari proporsi penggunaan anggaran antara pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang sudah berlangsung hampir lima tahun (2014 – 2019) dengan pemerintahan sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono (2009 – 2014).

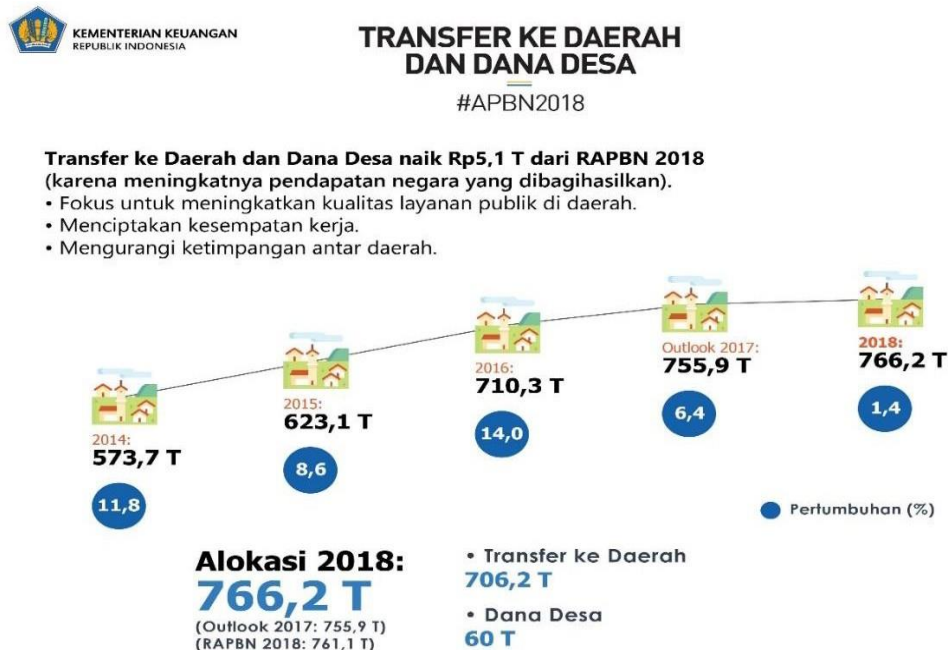
Pada awal pemerintahannya, Jokowi – JK sudah memangkas subsidi bahan bakar minyak. Pemerintahan ini memilih merealokasikan anggaran subsidi untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama dalam agenda kerjanya, selain bidang pendidikan dan kesehatan. Karena itu, alokasi anggaran infrastruktur pada masa pemerintahan Jokowi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Terutama pada masa pemerintahan Jokowi-JK pembangunan berfokus pada daerah pinggiran yaitu pedesaan.



**Gambar 1.4 Grafik Perbandingan Transfer ke Daerah Tahun 2005 - 2016**  
 Sumber: Kementerian Keuangan RI ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Dilihat dari grafik diatas, perkembangan dana transfer ke daerah meningkat jauh lebih pesat pada masa pemerintahan Jokowi – JK. Pada Era SBY rata-rata alokasi transfer daerah sebesar 32 % dari total belanja Negara. Di era Jokowi, rata-rata alokasi transfer daerah mampu ditingkatkan mencapai 36 % dari total belanja Negara. Transfer daerah juga difokuskan melalui Dana Otonomi Khusus atau Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pembangunan infrastruktur fisik yang dapat menambah daya saing daerah. Komitmen untuk mendukung pembangunan dari pinggiran juga ditunaikan melalui implementasi Dana Desa pada 2015. Anggaran Dana Desa terus bertambah dari Rp 20,8 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 47,0 triliun pada tahun 2016. Tujuan pemerintahan Presiden Jokowi memberikan Dana

Desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.



**Gambar 1.5 Transfer ke daerah dan Dana Desa**

Sumber: Kementerian Keuangan RI ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap Desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Pada 2017, pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun untuk Dana Desa. Rata-rata per desa akan mendapatkan Rp 800,4 juta. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 46,98 triliun atau rata-rata mendapat Rp 643,6 juta per desa. Wilayah Jawa akan mendapatkan dana desa sebesar Rp 18,65 triliun. Angka



ini akan dibagikan kepada 22 ribu desa yang tersebar di wilayah tersebut. Disusul wilayah Sumatera akan mendapatkan Rp 17,99 triliun untuk 23 ribu desa.

**Tabel 1.3**

**Dana Desa per Pulau di Indonesia Tahun 2017**

<b>Wilayah</b>	<b>Jumlah Desa</b>	<b>Anggaran Dana Desa</b>
Sumatra	23.053	<b>Rp. 17,99 triliun</b>
Jawa	22.475	<b>Rp. 18,65 triliun</b>
Kalimantan	6.618	<b>Rp. 5,25 triliun</b>
Sulawesi	8.756	<b>Rp. 6,87 triliun</b>
Bali dan Nusa Tenggara	4.627	<b>Rp. 3,76 triliun</b>
Maluku dan papua	9.425	<b>Rp. 7,45 triliun</b>

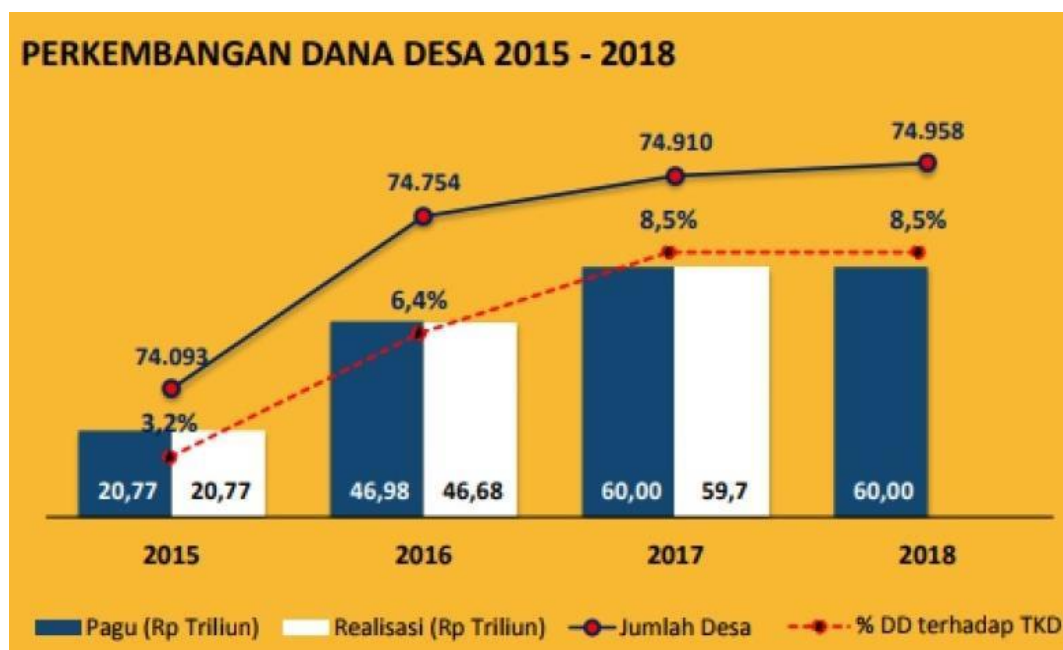
Sumber: *Kementerian Keuangan RI* ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Sejak dimulainya program Dana Desa, pemerintah dan masyarakat mengutarakan begitu banyak harapan yang di antaranya adalah untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat serta untuk membangun infrastruktur dan sektor padat karya yang bisa langsung berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Penciptaan lapangan kerja diharapkan akan lebih meningkat seiring meningkatnya dana desa. Program ini juga diharapkan dapat menjadikan desa sebagai pilar penting dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan.

Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian

sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana tersebut (Kemendes PDTT, 2016).

Dasa Desa dalam kebijakan pemerintahan Jokowi – JK sangat berkembang pesat dan terus meningkat. Dengan adanya Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa dengan cara meningkatkan potensi desa sehingga akan kualitas hidup masyarakat di desa bisa meningkat juga.



**Gambar 1.6 Perkembangan Dana Desa Tahun 2015 – 2018**

Sumber: Kementerian Desa RI ( [www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id) )

Total Dana Desa sejak tahun 2015 hingga 2018 sudah mencapai Rp 187,75 triliun. Dana desa menjadi salah satu kebijakan di pemerintahan Jokowi – JK. Pada tahun 2015, jumlah desa sebanyak 74.093 desa dengan dana desa sebesar Rp. 20,77 triliun. Anggaran dana desa sampai tahun 2018 terus meningkat sangat pesat sebesar Rp. 60 triliun dikarenakan jumlah desa yang juga ikut meningkat sebanyak 74.958 desa.

Dalam tiga tahun terakhir implementasi Dana Desa, data mencatat hasil yang signifikan. Dana desa telah membangun 123.858 kilometer jalan desa, 791.258 kilometer jembatan desa, 6.576 unit pasar desa, 26.750 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 2.960 tambatan perahu, 1.971 unit embung, 28.830 unit irigasi, dan 3.111 unit sarana olahraga desa. Infrastruktur tersebut dibangun untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan yang bersifat peningkatan kualitas hidup masyarakat desa yakni 67.094 unit penahan tanah, 38.331 unit air bersih, 112.003 unit MCK, 5.402 unit Polindes, 38.217 unit drainase, 18.177 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 11.574 unit Posyandu, dan 31.122 unit sumur. Program membuat MCK, air bersih, PAUD, Posyandu, turap, dan lainnya meningkatkan indeks pembangunan manusia di desa sehingga kualitas hidup masyarakat desa meningkat (Kemendes PDTT, 2018).

Fokus kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, serta untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Akan tetapi, pelaksanaan anggaran Dana Desa yang sangat besar tersebut masih menghadapi kendala. Di antaranya, masih rendahnya aparatur pemerintah daerah dan desa untuk merancang dan mengelola penggunaan Dana Desa serta rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat desa. ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id))

Penetapan kebijakan Dana Desa ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pihak yang mendukung kebijakan ini merasa bahwa wilayah perdesaan selalu menjadi wilayah yang terpinggirkan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan alokasi dana untuk pembangunan desa. Dengan adanya Dana Desa, pembangunan desa dapat

dijalankan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Di sisi lain, terdapat pihak yang kontra terhadap kebijakan Dana Desa. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah perdesaan dianggap belum mampu mengemban amanah pembangunan desa secara mandiri. Dikhawatirkan apabila penggunaan Dana Desa tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Realitas yang terjadi pada implementasi konsep desentralisasi justru menjadi bayangan kelam penerapan kebijakan Dana Desa yang dikhawatirkan akan menjadi ajang penyelewengan dana APBN.

Pengalokasian Dana Desa dari APBN terus meningkat. Dalam empat tahun ini, setidaknya pemerintah telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 187 triliun untuk percepatan pembangunan desa. Pada tahun 2015 lalu, dana desa disalurkan sebesar Rp 20,7 triliun kepada 74.093 desa. Meningkat di tahun kedua, yakni 2016, menjadi Rp 47 triliun untuk 74.754 desa. Di tahun 2017, jumlah dana desa yang disalurkan kepada 74.910 desa mencapai Rp 60 triliun. Dan pada 2018 dengan jumlah yang sama yaitu Rp 60 triliun kepada 74.957 desa. ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id))

Dana desa hanya berpengaruh terhadap penduduk hampir miskin melalui peningkatan pengeluaran per kapitanya, akan tetapi tidak mampu menyentuh pada masyarakat yang berada di level sangat miskin. Dana Desa juga berpengaruh dalam penurunan kesenjangan antara desa dan kota, namun tidak berpengaruh kepada kesenjangan antarpenduduk di dalam desa.

Beberapa peneliti salah satunya (Aziz, 2016) menemukan bahwa terdapat berbagai hambatan dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa, seperti

rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia Pemerintahan Desa dan keaktifan dalam berpartisipasi masyarakat desa yang sangat minimal. Pada saat ini Dana Desa tetap menghadapi kendala, kejadian tersebut merupakan hal yang wajar dikarenakan Dana Desa adalah suatu program baru yang memerlukan perbaikan dalam berproses dengan melihat keadaan di lapangan. Kendala rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia Pemerintahan Daerah, khususnya untuk Pemerintah Desa menyebabkan terlambatnya proses penyaluran Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang berkenaan dengan penggunaan Dana Desa terhadap pengembangan ekonomi desa dalam meningkatkan kualitas hidup di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan melihat apakah dengan adanya kebijakan Dana Desa dapat mengembangkan ekonomi desa dalam mendukung kualitas hidup masyarakat desa. Untuk itu, penelitian ini berjudul **“Evaluasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Untuk Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat Di Indonesia”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka didapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Indonesia tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan masih lebih baik dibandingkan dengan Negara-negara lainnya selama kurun waktu 2006–2015 yang mencapai 5,7 %, akan tetapi nyatanya masih ada masalah kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan

2. Pelaksanaan anggaran Dana Desa yang sangat besar tersebut masih menghadapi kendala. Salah satunya masih rendahnya aparaturnya Pemerintah Kabupaten dan Desa untuk mengelola penggunaan Dana Desa serta rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat desa.
3. IPM meningkat sekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir. Namun, di saat yang bersamaan, UNDP melihat ada sejumlah indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan IPM tersebut.
4. Pengalokasian Dana Desa dari APBN terus meningkat, setidaknya pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 187 triliun untuk percepatan pembangunan desa. Namun, Dana Desa hanya berpengaruh terhadap penduduk hampir miskin melalui peningkatan pengeluaran per kapitanya, akan tetapi tidak mampu menyentuh pada masyarakat yang berada di level sangat miskin. Sehingga penyaluran Dana Desa dianggap kurang efektif.
5. Fokus kebijakan Dana Desa hanya dianggap untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan. Akan tetapi bukan berfokus tentang masalah kualitas sumber daya manusianya.

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **1.3.1 Batasan Masalah**

Ada banyak masalah yang bisa diangkat dari penelitian ini, namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah. Jadi penelitian ini hanya dibatasi pada masalah seberapa besar Dana Desa mampu mempengaruhi pengembangan ekonomi pedesaan dalam meningkatkan

kualitas hidup di Kabupaten se-Indonesia.

### **1.3.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan kebijakan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi pedesaan di Kabupaten se-Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Dana Desa dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten se-Indonesia?
3. Bagaimana pemetaan Dana Desa dan kualitas pembangunan ekonomi Provinsi di Indonesia?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisis ekonomi deskriptif tentang perkembangan kebijakan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi pedesaan se- Kabupaten di Indonesia.
2. Melakukan estimasi pengaruh Dana Desa dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Indonesia.
3. Melakukan pemetaan dengan Tipologi Klassen untuk melihat penyebaran pemetaan Dana Desa dengan kualitas pembangunan ekonomi.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan dunia di sektor keuangan negara dan pembangunan nasional maupun kalangan masyarakat umum. Manfaat yang dapat

diambil diantaranya:

### **1.5.1 Manfaat Akademik**

a. Bagi peneliti:

- (1) Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.
- (2) Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

b. Bagi mahasiswa:

- (1) Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.
- (2) Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

### **1.5.2 Manfaat Non-akademik**

- a. Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintahan.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teoritis**

##### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006).

Sedangkan menurut Kuznets (Jhingan, 2010) pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

Menurut Hollis B. Chenery (Todaro & Smith, 2011), Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional

menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita.

#### A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

##### 1. Adam Smith

Teori Pertumbuhan ekonomi Adam Smith dalam bukunya berjudul *An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation* ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total.

##### a. Pertumbuhan output

Sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu:

1. Sumber daya alam
2. Sumber daya manusia
3. Stok kapital yang tersedia

Sumber-sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan maka pertumbuhan ekonomi masih tetap bisa ditingkatkan. Selanjutnya unsur jumlah penduduk dan stok kapital menentukan besarnya output masyarakat dari tahun ke tahun. Tetapi apabila output terus meningkat, sumber-sumber alam akhirnya akan sepenuhnya dimanfaatkan

(dieksploitasi) hingga batas ketersediaannya. Tingkat ketersediaan sumber daya alam ini akan menjadi batas atas dari pertumbuhan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi (dalam arti pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk) akan berhenti apabila batas atas ini dicapai.

Unsur yang kedua adalah sumber daya manusia atau jumlah penduduk. Dalam proses pertumbuhan output, unsur ini dianggap mempunyai peranan pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya apabila stok kapital yang tersedia membutuhkan pekerja 1 juta orang untuk menggunakannya, sementara jumlah tenaga kerja yang tersedia hanya 900 ribu orang maka jumlah penduduk yang akan menempati pekerjaan itu akan cenderung meningkat sehingga tenaga kerja yang tersedia akhirnya akan mencapai 1 juta orang.

Unsur produksi yang ketiga yaitu stok kapital, yang secara aktif menentukan output. Smith memang memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan *output*. Apa yang terjadi dengan tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital. Di samping itu laju pertumbuhan *output* juga tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital. Pertumbuhan itu akan terus melaju hingga akan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam dan dukungan sumber daya manusia yang terampil.

#### b. Pertumbuhan penduduk

Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong

pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2006).

## 2. David Ricardo

Menurut Ricardo, proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Kesimpulan umumnya juga masih tetap sama yaitu bahwa dalam perpacuan tersebut penduduklah yang akhirnya mencapai posisi stasioner. Seperti juga dengan Adam Smith, Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (yaitu, sumber- sumber alam) tidak dapat bertambah sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Perbedaan terutama terletak pada penggunaan alat analisis mengenai distribusi pendapatan (berdasarkan teori Ricardo yang terkenal itu) dalam penjabaran mekanisme pertumbuhan dan pengungkapan peranan yang lebih jelas dari sektor pertanian di antara sektor-sektor lain dalam proses pertumbuhan. (Kuncoro, 2000)

Proses pertumbuhan yang digambarkan Ricardo ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terbatasnya jumlah tanah, yang sangat susah untuk diperluas, sebagai faktor produksi.
- b. Peningkatan atau penurunan ketersediaan tenaga kerja (penduduk) sesuai

- dengan tingkat upah yaitu apakah di atas atau di bawah tingkat upah minimal, yang oleh Ricardo disebut tingkat upah alamiah (*natural wage*).
- c. Akumulasi kapital terjadi apabila keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi meningkat.
  - d. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi.
  - e. Masih dominannya sektor pertanian dalam ekonomi keseluruhan.

### 3. Thomas Robert Malthus

Dalam pandangan mazhab Klasik mengenai perkembangan ekonomi secara umum, nampak adanya pengaruh dari gagasan Malthus tentang signifikansi masalah penambahan penduduk terhadap perkembangan ekonomi. Dengan demikian maka hal ini perlu diperhatikan karena masalah penduduk mempunyai arti dan relevansi terhadap perkembangan ekonomi. Menurut Malthus secara alamiah populasi akan terus mengalami peningkatan lebih cepat daripada suplai makanan. Produksi makanan per kapita, tentu saja akan mengalami penurunan, sementara populasi mengalami kenaikan. Malthus berpendapat bahwa tidak menjadi jaminan kalau penambahan penduduk secara kuantitatif akan berpengaruh terhadap kelangsungan pertumbuhan. Malthus membeberkan sejumlah faktor kendala terhadap kelangsungan pertumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitatif sekali-kali tidak menjadi jaminan bahwa pendapatan riilnya juga akan meningkat dengan sepadan. Pertambahan penduduk hanya mendukung pertumbuhan terhadap tata susunan ekonomi, apabila perkembangan ekonomi dapat meningkatkan daya beli real (permintaan efektif) masyarakat secara menyeluruh. Barulah, dalam

keadaan demikian maka akan terlaksana akumulasi modal sebagai ciri pokok dalam proses pertumbuhan, sekaligus juga akan menimbulkan permintaan akan tenaga kerja. Kendala terhadap perkembangan tersebut oleh Malthus diungkapkan dalam teorinya mengenai ketidakmampuan untuk berkonsumsi secara memadai (*theory of underconsumption*). (Boediono, 2009)

Masalah penting dalam pembahasan Malthus yang menarik perhatian dan sampai sekarang masih relevan bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang ialah segi institusi yang bersifat sosiologis-ekonomis. Dalam masyarakat di negara-negara maju, termasuk di kalangan cendekiawan, sering terdapat pandangan seolah-olah keterbelakangan dan kemacetan ekonomi di belahan dunia lain (Amerika Latin, Afrika, Asia) disebabkan oleh tabiat dan perilaku penduduk setempat, yaitu sikap memudahkan sesuatu, malas dan mempunyai ketergantungan pada alam yang sangat tinggi, keadaan sumber daya alam yang sangat menguntungkan dan memudahkan kehidupan manusia. (Boediono, 2009)

Pandangan yang dangkal tetapi populer itu kebenarannya dibantah oleh Malthus. Malthus menunjuk kepada kenyataan institusional dalam tata susunan ekonomi masyarakat yang menjadi kendala besar bagi kemajuan rakyat. Keterbelakangan dan kemiskinan penduduk di negara-negara yang dimaksud bukanlah disebabkan oleh terbatasnya tanah subur atau semakin kecilnya luas tanah karena penduduk bertambah; bukan pula oleh “kemalasan” penduduk. Kemiskinan itu ada sangkut-pautnya dengan kenyataan bahwa tanah yang sangat luas dikuasai oleh segelintir kalangan

atas dalam masyarakat yang terdiri dari sejumlah keluarga tuan tanah. Konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah serupa itu tidak memberikan dorongan dan sama sekali tidak mengandung perangsang bagi petani penggarap tanah untuk mencari kemajuan dengan cara meningkatkan hasil produksinya, apalagi dengan cara melakukan investasi. Hal ini dikarenakan sebagian besar hasil produksi tanah dinikmati oleh tuan tanah, sedangkan hasil produksi masyarakat kecil (golongan lemah) lebih diperuntukkan buat pemenuhan kebutuhan dasar dan hanya sebagian kecil yang diinvestasikan. (Boediono, 2009)

#### 4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Karl Max

Pola pendekatan dinamika (*pattern of dynamic approach*) yang menyangkut perkembangan masyarakat secara menyeluruh dalam jangka panjang, bukanlah cara pandang yang baru timbul di zaman modern. Haluan pemikiran tersebut telah terkandung di dalam gagasan-gagasan para pakar teori klasik. Pola pendekatan demikian lebih menonjol lagi dalam sistem pemikiran Karl Marx, yang dapat dianggap sebagai teori dinamika yang paling komprehensif. Dalam hubungan itu, pandangan para pakar teori klasik dan Karl Marx dapat dimasukkan dalam kategori *grand theories* dan kadang – kadang sebagai *magnificent dynamics*. Karl Marx menyoroti banyak aspek dalam teorinya yang terkenal sebagai teori konflik. Dalam perspektif pertumbuhan ekonomi, Marx menonjolkan pendeskripsian tentang perkembangan masyarakat dari polanya yang sederhana hingga menjadi masyarakat yang berstruktur kompleks dan dengan pembagian kerja yang ketat dalam masyarakat kapitalis. (Boediono, 2009)

Dalam gagasannya mengenai konsep materialisme historis, Marx mengungkapkan bahwa aktivitas produktif manusia merupakan kunci untuk menganalisis kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadi substansi masyarakat kapitalis, yaitu bahwa seluruh masyarakat harus membuat diri mereka produktif dari tahun ke tahun. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat terikat dalam produksi yang bersifat materi. Para kapitalis merupakan pihak yang memiliki posisi tawar tertinggi, sedangkan kaum buruh hanya dapat menjual tenaganya kepada majikan sebagai satu input dalam proses produksi. Maka, terjadilah eksploitasi besar-besaran terhadap kaum buruh. Pada masa itu modal merupakan kunci untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Sejalan dengan perkembangan teknologi, para pengusaha yang menguasai faktor produksi akan berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan menginvestasikan akumulasi modal yang diperolehnya. Menurut Marx, kemampuan kapitalis untuk mengakumulasi modal terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas buruh yang dipekerjakannya. Nilai buruh yang dinyatakan dalam bentuk upah merupakan manifestasi dari jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh tersebut. (Boediono, 2009)

#### B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Perdagangan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan



pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk konsumsi. Yang disebut terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijembatani oleh investasi. Jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi maka harga permintaan agregat akan turun, lebih rendah daripada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut tejembatani. Jadi perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagian besar akan tergantung pada investasi. Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Efisiensi marginal dan modal merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Bilamana harapan laba tinggi, pengusaha menginvestasi lebih besar. Suku bunga, yang merupakan faktor lainnya dari investasi, tergantung pada kuantitas. Sekarang investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Walaupun kenaikan investasi biasanya menyebabkan kenaikan pekerjaan, ini bisa tidak terjadi jika pada waktu yang sama kecenderungan untuk mengkonsumsi turun.

Sebaliknya kecenderungan berkonsumsi dapat mengakibatkan kenaikan pada pekerjaan kenaikan pada investasi. Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan. Dan karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Proses ini cenderung

menggumpal (*kumulatif*). Akibatnya kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan berkonsumsi. (Jhingan, 2010)

Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini oleh Keynes disebut multiplier K. Pengali (multiplier) ini memperlihatkan hubungan yang tepat, berkat adanya kecenderungan berkonsumsi tersebut, antara pekerjaan agregat dan pendapatan agregat dengan tingkat investasi. Ini berarti, bila investasi agregat naik, pendapatan akan meningkat, yang besarnya adalah K kali kenaikan investasi tersebut. Rumusnya ialah  $\Delta Y = K\Delta I$ , dan  $1-1/K$  mewakili kecenderungan marginal mengkonsumsi. Jadi pengali  $K = 1/1-MPC$ . Karena kecenderungan marginal berkonsumsi turun, berkat adanya kenaikan pendapatan, maka diperlukan suntikan investasi dengan dosis besar guna memperoleh tingkat pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi dalam perekonomian. Inilah secara singkat teori Keynes mengenai pekerjaan. (Jhingan, 2010)

Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam "*General Theory*"-nya. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrod, Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Hanya dalam karangannya yang berjudul "*Economic Possibilities for Our Grand Children*" Keynes mengemukakan serentetan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu (i) kemampuan kita mengendalikan penduduk; (ii) kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil; (iii) kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan,

mempedomani hal-hal yang benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan; dan (iv) tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi. Sejauh menyangkut kekhawatiran akan masa depan kapitalisme, Keynes bersifat optimis. Keynes menganggap kapitalisme sebagai suatu mekanisme yang mempunyai kekenyalan dan daya adaptasi yang besar dalam membentuk dirinya sendiri menurut keadaan. Keynes membangun teori kebangkrutan kapitalisnya (stagnasi jangka panjang) berdasarkan over-produksi umum, konsumsi rendah yang kronis dan merosotnya efisiensi marginal modal di masa depan. (Jhingan, 2010)

### C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

#### 1. W.W. Rostow

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh W.W. Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* pada Maret 1956 berjudul *The Take-Off Into Self-Sustained Growth* pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelisik dari aspek sejarah pertumbuhannya hanya dalam tiga tahap: tahap prekondisi tinggal landas (yang membutuhkan waktu berabad-abad lamanya), tahap tinggal landas (20-30 tahun), dan tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus-menerus. (Boediono, 2009)

Rostow pulalah yang membuat distingsi antara sektor tradisional dan sektor kapitalis modern. Frasa-frasa ini terkenal dengan terminologi '*less developed*', untuk menyebut kondisi suatu negara yang masih mengandalkan sektor tradisional, dan terminologi '*more developed*' untuk menyebut kondisi suatu negara yang sudah mencapai tahap industrialisasi dengan mengandalkan

sektor kapitalis modern.

Dalam hal prakondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, penekanannya terdapat pada keseluruhan proses di mana masyarakat berkembang dari suatu tahap ke tahap yang lain. Tahap- tahap yang berbeda ini ditujukan untuk mengidentifikasi variabel – variabel kritis atau strategis yang dianggap mengangkat kondisi-kondisi yang cukup dan perlu untuk perubahan dan transisi menuju tahapan baru yang berkualitas. Teori ini secara mendasar bersifat *unilinear* dan *universal*, serta dianggap bersifat permanen.

Sebagai bagian teori modernisasi, teori ini mengkonsepsikan pembangunan sebagai modernisasi yang dicapai dengan mengikuti model kesuksesan Barat. Para pakar ekonomi menganggap bahwa teori pertumbuhan ekonomi ini merupakan contoh terbaik dari apa yang diistilahkan sebagai ‘teori modernisasi’. (Kuncoro M. , 2000)

Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap:

1. Masyarakat tradisional (*The Traditional Society*),
2. Masyarakat Pra-kondisi untuk Periode Lepas Landas (*The Preconditions for Take Off*),
3. Proses Lepas landas (*The Take Off*),
4. Gerak Menuju Kedewasaan (*Maturity*)
5. Tingkat Konsumsi Tinggi (*High Mass Consumption*)

2. Harrod – Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat.

Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod- Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). (Boediono, 2009)

Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi:

- a. Perkonomian bersifat tertutup.
- b. Hasrat menabung ( $MPS = s$ ) adalah konstan.
- c. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*).
- d. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ( $Y = C + I$ ).

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut:

$$g = K = n \dots\dots\dots(2-1)$$

Dimana :  $g = Growth$  (tingkat pertumbuhan output)

$K = Capital$  (tingkat pertumbuhan modal)

$n$  = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

#### D. Produk Domestik Bruto (PDB)

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai perekonomian sedang berlangsung baik atau buruk. Indikator dalam menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah Produk Domestik Bruto (PDB) / *Gross Domestic Product* (GDP).

*Gross Domestic Product* (GDP) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (*final*) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Dalam *Gross Domestic Product* (GDP) terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan.<sup>46</sup> Selain itu, *Gross Domestic Product* (GDP) juga mengukur dua hal pada saat bersamaan yaitu total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian (Mankiw, 2007).

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDB yaitu (Case & Fair, 2008):

##### a. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode menghitung

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam memproduksi barang akhir.

b. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah suatu metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur jumlah yang dikeluarkan pada semua barang akhir selama satu periode tertentu.

c. Pendekatan Produksi

Pendekatan Produksi adalah metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi yang ada di suatu negara tanpa membedakan apakah faktor produksi itu milik orang luar negeri atau warga negara itu sendiri.

## 2.1.2 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (*gross national income-GNI*) per kapita “*riil*” (pertumbuhan moneter dari GNI per kapita dikurangi tingkat inflasi) sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan-seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro & Smith, 2011).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang

muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro & Smith, 2011)

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap- sikap masyarakat, dan institusi – institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

Menurut Sumitro Djojohadikusumo, pembangunan ekonomi adalah suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Sanusi, 2004).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja semakin bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2006).

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan, salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal



materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta (Jhingan, 2010).

#### A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

##### 1. Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini:

##### a. Hukum alam

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan nasional.

##### b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan

ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan: (1) meningkatnya keterampilan pekerja; (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; (3) penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar-menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

c. Proses Pemupukan Modal

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus- menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan.” Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga-dapat memberikan

penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

## 2. David Ricardo

David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation*. Buku ini diterbitkan 1917. Edisi ketiga 1921 serta korespondensi Ricardo dengan beberapa ahli ekonomi lainlah yang menurut ide-ide Ricardo yang menjadi dasar pembentukan model pembangunan Ricardo. Sesungguhnya Ricardo tidak pernah mengajukan satu pun teori pembangunan. Menurut Schumpeter, ia hanya mendiskusikan teori distribusi. Oleh sebab itu analisa Ricardo merupakan analisa yang memutar.

Asumsi teori Ricardo Teori-teori Ricardian didasarkan pada asumsi bahwa:

- 1) Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri;
- 2) “law of diminishing return” berlaku bagi tanah;
- 3) Persediaan tanah adalah tetap;
- 4) Permintaan akan gandum benar-benar inelastis;
- 5) Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel;
- 6) Keadaan pengetahuan teknik adalah tertentu (*given*);
- 7) Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal;

- 8) Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap;
- 9) Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal; dan bahwa baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja;
- 10) Terdapat persaingan yang sempurna;
- 11) Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan;

Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil dibagi-bagikan. Sementara Ricardo sendiri menulis dalam pendahuluan bukunya, “Hasil bumi (hasil yang diperoleh dari permukaannya dengan menggunakan buruh secara terpadu, mekanisasi, dan modal) dibagi-bagikan kepada tiga kelas masyarakat yaitu pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang mengerjakan.” Keseluruhan pendapatan nasional dibagi-bagikan kepada tiga kelompok tersebut masing-masing sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah. (Jhingan, 2010)

#### B. Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu:

## 1. Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum *law of diminishing return*. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

## 2. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem

produksi yang ada akan meningkatkan *output* yang diproduksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk *horizontal*. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan di sektor modern tersebut. Percepatan ekspansi output sangat ditentukan oleh ekspansi di sektor industri dan akumulasi modal di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industri tersebut.

### C. Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery

Analisis teori *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang menagalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian

suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (human capital). (Todaro & Smith, 2011)

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan structural itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa tansisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2011)

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualism ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses

transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2011)

#### D. Teori Pembangunan Ekonomi Fei-Ranis

Teori pembangunan ekonomi Fei-Ranis berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumberdaya, dimana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ekonomi pertaniannya berhenti. Kebanyakan orang bergerak di lapangan pertanian tradisional. Bidang- bidang nonpertanian memang ada, tetapi begitu banyak mempergunakan modal. Disitu juga ada sektor industri yang aktif dan dinamis. Pembangunan terdiri dari pengalokasian kembali surplus tenaga kerja di bidang pertanian, yang sumbangannya terhadap *output* adalah nol atau dapat diabaikan, ke sektor industri di mana mereka menjadi produktif dengan upah yang sama dengan upah di bidang pertanian.

Asumsi di dalam mengemukakan teori pembangunan ekonominya, Fei dan Ranis membuat asumsi berikut:

1. Ada ekonomi dua-muka yang terbagi dalam sektor pertanian tradisional yang mandeg, dan sektor industri yang aktif.
2. *Output* sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh aja.
3. Di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali (reklamasi).
4. Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap.
5. Kegiatan pertanian ditandai dengan hasil (*return to scale*) yang tetap



dengan buruh sebagai faktor variabel.

6. Diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh adalah nol.  
Jika penduduk melampaui jumlah di mana produktivitas marginal buruhnya nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industri tanpa mengurangi keluaran (*output*) pertanian.
7. *Output* sektor industri adalah fungsi dari modal dan buruh aja.
8. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen.
9. Upaya nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian.
10. Pekerja di masing-masing sektor hanya mengkonsumsi produk produk pertanian.

Berdasarkan asumsi ini, Fei dan Ranis menelaah pembangunan ekonomi surplus-buruh menjadi tiga tahap. Pada *tahap pertama*, para penganggur tersamar yang tidak menambah *output* pertanian, dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Pada *tahap kedua*, pekerja pertanian menambah keluaran pertanian tetapi memproduksi lebih kecil daripada upah institusional yang mereka peroleh. Ini mengawali *tahap ketiga*, yang menandai akhir tahap tinggal landas dan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar daripada perolehan upah institusional. Di dalam tahap ini kelebihan buruh sudah terserap dan sektor pertanian berangkat menjadi komersial.

#### E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosio – ekonomi disajikan dalam laporan –

laporan tahunan UNDP yang berjudul *Human Development Report* (Laporan Pembangunan Manusia). Inti semua laporan ini, yang dimulai pada tahun 1990, adalah pembuatan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) (Todaro & Smith, 2011). Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui *Human Development Report* tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. Umur Panjang dan Sehat

Untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak

Masih Hidup (AMH). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

## 2. Pengetahuan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan angka melek huruf. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 100 menggambarkan kondisi 100 persen atau

semua masyarakat mampu membaca dan menulis, sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya.

### 3. Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Indikator digunakan untuk mengukur standar hidup layak ialah indikator daya beli. Indikator ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produktif sehingga menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa sebagai pendapatan. Kemudian pendapatan yang ada menciptakan pengeluaran atau konsumsi. Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (*Purchasing Power Parity*) masyarakat, dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah.

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = \frac{X(i) - X(\min)}{X(\max) - X(\min)} \dots \dots \dots (2.2)$$

Keterangan:

- (i) = Komponen IPM ke-i
- (min) = Nilai minimum dari komponen IPM ke-i
- (maks) = Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain yaitu yang pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Ketiga, Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). ([www.ipm.bps.go.id](http://www.ipm.bps.go.id))

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1.  $IPM < 60$  : IPM rendah
2.  $60 \leq IPM < 70$  : IPM sedang
3.  $70 \leq IPM < 80$  : IPM tinggi
4.  $IPM \geq 80$  : IPM sangat tinggi

IPM yang lebih kecil maka di kategorikan sebagai wilayah dengan IPM rendah. Untuk IPM bersekitar antara 60 sampai dengan 70 maka di kategorikan sebagai wilayah dengan IPM sedang. Akan tetapi, jika IPM bersekitar 70 sampai dengan 80 dikategorikan termasuk IPM tinggi. Sedangkan, untuk yang memiliki IPM 80 keatas maka wilayah tersebut termasuk memiliki IPM yang sangat tinggi. ([www.ipm.bps.go.id](http://www.ipm.bps.go.id)).

### 2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

#### A. Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional. Kedua pandangan yang berbeda mengenai pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) dalam kajian teori ekonomi makro dapat dijelaskan sebagai berikut (Manik & Hidayat, 2010):

##### 1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

## 2. Teori Wagner dan Pengikutnya

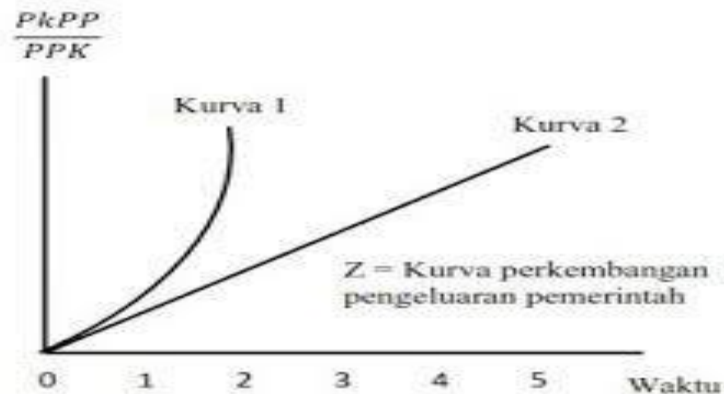
Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PPkP}{PPK1} < \frac{PPkP}{PPK1} < \dots < \frac{PPkP}{PPK1} < \dots \dots \dots (2-4)$$

Keterangan:

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk  
1, 2,...,n : jangka waktu (tahun)



**Gambar 2.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**

Sumber: Mangkoesobroto, 2001

Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

### 3. Teori Peacock dan Wiseman

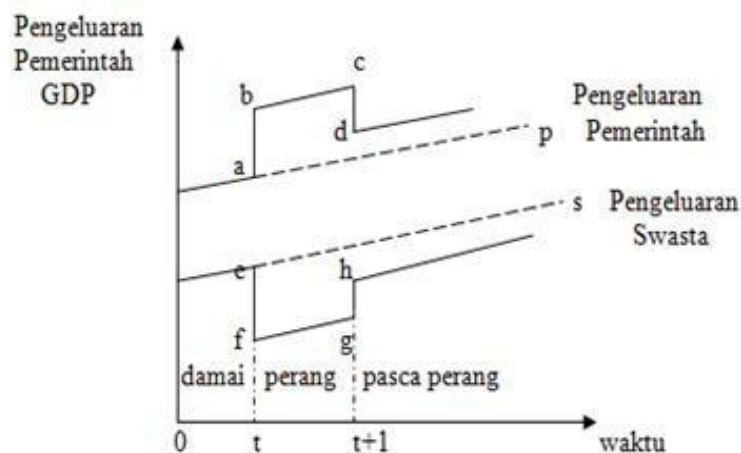
Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan



pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai sematamata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini:



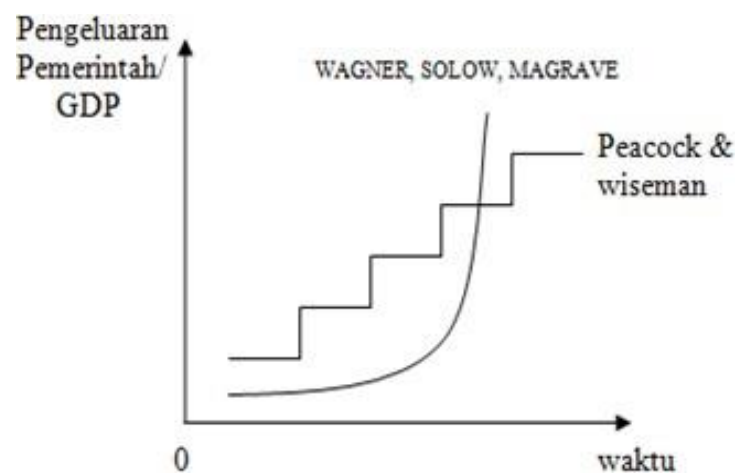
**Gambar 2.2 Kurva Peacock dan Wiseman**

Sumber: Mangkoesoebroto, 2001

Dalam keadaan normal, t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan

kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun  $t+1$ , pengeluaran pemerintah tidak menurun ke  $G$ . Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



**Gambar 2.3 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave**  
*Sumber: Mangkoesoebroto, 2001*

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Solow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

Sedangkan tujuan dari teori mikronya, perkembangan pengeluaran

pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Penentuan Permintaan

$$U^i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana:

- $U^i = f(G, X)$
- $G =$  vektor dari barang publik
- $X =$  vektor barang swasta
- $i =$  individu;  $= 1, \dots, m$
- $U =$  fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (*budget constraints*). Misalkan seorang individu ( $i$ ) membutuhkan barang publik ( $K$ ) sebanyak  $G_k$ . Untuk menghasilkan  $i$  barang  $K$  sebanyak  $G_k$ , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat.

b. Penentuan Permintaan

$$U^i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana:

$$U_i = f(G, X)$$

G = vektor dari barang publik

X = vektor barang swasta

i = individu; = 1, ..., m

U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (*budget constraints*). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak  $G_k$ . Untuk menghasilkan i barang K sebanyak  $G_k$ , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

c. Penentuan tingkat output

$$U_p = g(X, G, S) \dots \dots \dots (2-3)$$

$U_p$  = fungsi utilitas

S = keuntungan yang diperoleh politisi

G = vektor barang publik

$X$  = vektor barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih:

$$\text{Max } U_i = f(X, G) \dots\dots\dots(2-4)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya:

$$P_x X + t B < M_i \dots\dots\dots(2-5)$$

Dimana:

$P$  = vektor harga barang swasta

$X$  = vektor barang swasta

$B_i$  = basis pajak individu

$M_i$  = total pendapatan individu 1

$T$  = tariff pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*Price Taker*). Atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang publik, sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).

## B. Desentralisasi Fiskal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan

yang lebih baik agar tercipta kemudahan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat (Rochjadi, 2004).

Dalam teori ekonomi publik dibahas mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pusat. Musgrave menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Musgrave terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat (*sentralisasi*) ataukah didesentralisasikan. Faktor yang pertama adalah *eksternalitas* dan uang, yang kedua ialah *preferensi* (Azwardi & Abukosim, 2007).

Selanjutnya Boex dan Martinez-Vazquez mengemukakan empat pilar desentralisasi fiskal, yaitu melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer, dan pinjaman daerah yang dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (Azwardi & Abukosim, 2007).

Pada dasarnya transfer pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Adapun tujuan dari transfer ini adalah pemerataan vertikal (*vertical equalization*), pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), mengatasi persoalan efek pelayanan publik (*correcting spatial externalities*), mengerahkan prioritas (*redirecting priorities*), melakukan eksperimen dengan ide- ide baru, stabilisasi dan kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) di setiap

daerah (Hermawan, 2007).

Di dalam peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2013 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

#### **2.14 Kebijakan Dana Desa**

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan

memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. ([www.Kemendes.go.id](http://www.Kemendes.go.id))

#### A. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh Pemda diteruskan ke masing - masing Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima:

1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan



4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN menerima:

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD;
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50%. Capaian *output* paling kurang sebesar 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

Penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud di atas berlaku mulai tahun 2018. Untuk tahun 2017, ditentukan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan selanjutnya untuk Tahap II disampaikan ke KPPN.

Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sampai dengan bulan Juli dan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## B. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

### a. Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

### b. Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

### c. Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan

peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

d. Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

e. Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

1. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
2. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ([www.Kemendes.go.id](http://www.Kemendes.go.id))

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

### Penelitian Terdahulu

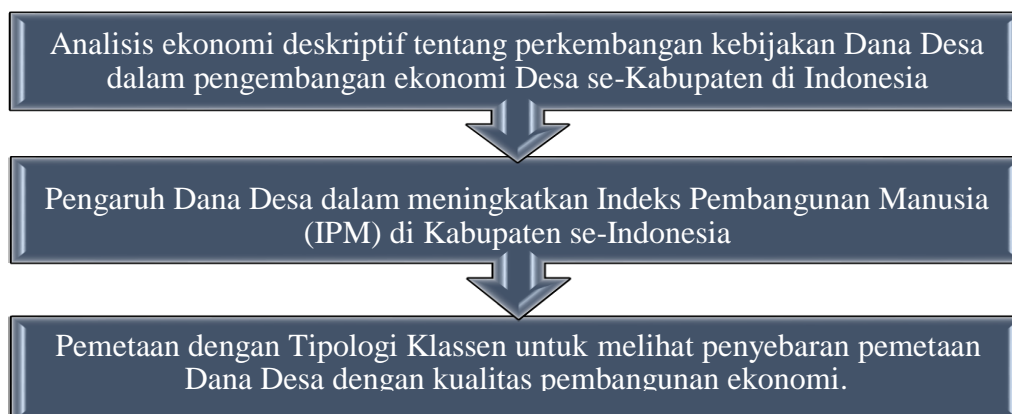
No	Penelitian dan Judul Penelitian	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<b>Napitupulu (2016)</b> , Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Pengembangan Wilayah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir	Deskriptif kuantitatif	Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pengembangan wilayah	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara Dana Desa dengan Alokasi Dana Desa.
2.	<b>Nilam Indah Susilowati, Dwi Susilowati, Syamsul Hadi (2017)</b> , Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur	Kualitatif Deskriptif	Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan PDRB, dan Kemiskinan	Alokasi Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto efektif dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan tiap Kabupaten/Kota. Sedangkan Dana Desa tidak efektif dan tidak berhasil dalam mengurangi kemiskinan di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

3.	<b>Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen, Arie D.P. Mirah (2017),</b> Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa	Deskriptif Kualitatif	Dana Desa, Pendapatan masyarakat, dan Penyerapan tenaga kerja.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dana Desa menfaat yang positif untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian desa.
----	--	-----------------------	--	---

### 2.3 Tahapan Penelitian

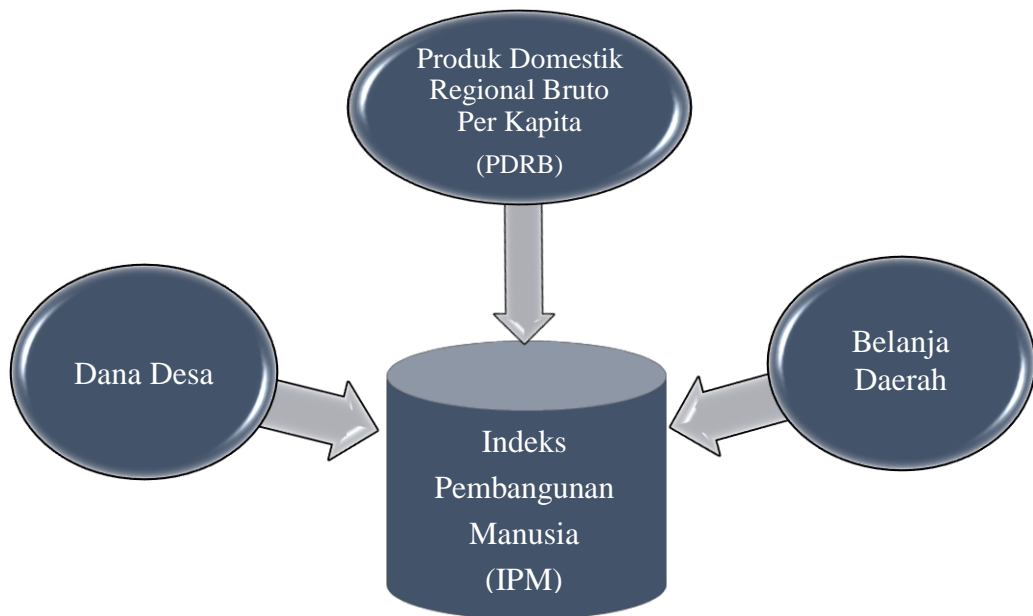
Secara umum, terdapat beberapa indikator yang dianggap sangat mempengaruhi Kebijakan Dana Desa dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu: (1) Dana Desa, (2) Produk Domestik Bruto (PDB), (3) Belanja Daerah. Keempat variabel tersebut akan mempengaruhi tingkat kualitas hidup secara parsial (dilihat dari IPM). Namun, secara simultan tingkat kualitas hidup akan dipengaruhi oleh Dana Desa dan IPM.

#### 2.3.1 Kerangka Analisis Penelitian



**Gambar 2.4 Kerangka Analisis Penelitian**

### 2.3.2 Kerangka Konseptual Model



**Gambar 2.5 Bagan Konseptual Model**

Dalam Model ini, Variabel Dana Desa, PDRB, dan Belanja Daerah merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap pertumbuhan IPM, yang dimana IPM merupakan variabel terikat.

### 2.4 Hipotesa

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka didapat hipotesa sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara Dana Desa (DD), Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB), dan Belanja Daerah (BD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antara variabel yang telah ditentukan dengan menggunakan data kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah. Data yang disajikan adalah panel data yaitu dimana penelitian menggunakan data *cross section*, data yang diteliti lebih dari satu; dan *time series*, yaitu waktu yang dihimpun pada tahun yang berbeda secara bersamaan. Data yang diteliti adalah seluruh Kabupaten di Indonesia dan waktu penelitian yang dihimpun adalah pada tahun 2015 sampai 2018 yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun variabel-variabel yang akan diamati adalah variabel-variabel yang terdapat pada Indeks Pembangunan Manusia yang dipengaruhi oleh Dana Desa.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah: Dana Desa (DD), Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB), dan Belanja Daerah (BD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Tabel 3.1**

**Definisi Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Sumber Data</b>
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Tingkat kualitas hidup masyarakat dalam pemanfaatan DD dalam satuan persen	BPS (Badan Pusat Statistik) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
DD (Dana Desa)	Dana APBN untuk kegiatan desa dalam satuan miliar rupiah	Kementerian Desa PDTT <a href="http://www.kemendes.go.id">www.kemendes.go.id</a>
PDRB Per Kapita (Produk Domestik Bruto)	Dilihat dari data PDRB per kapita dalam satuan jutaan rupiah	BPS (Badan Pusat Statistik) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
BD (Belanja Daerah)	Dana yang APBD untuk keperluan Negara dalam satuan miliar rupiah	Kementerian Keuangan <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>

**3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data Dana Desa di seluruh Kabupaten se-Indonesia pada tahun 2015 – 2018 yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini di rencanakan selama 3 bulan yaitu November 2018 sampai Januari 2019.

**3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala *numerik* (angka), yang dibedakan



menjadi data *interval* dengan data *rasio*. Data *interval* adalah data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Sedangkan, data *rasio* adalah data yang diukur dengan suatu proporsi. (Kuncoro, 2013)

Sumber data yang diperoleh langsung dari hasil publikasi yang berasal dari *website-website* resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendesa PDTT RI), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI), dan data dalam bentuk buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Henke & Reitsh (Kuncoro, 2013) pengumpulan data umumnya berasal dari Data *internal* atau *eksternal* dan Data primer atau data sekunder. Data *internal* berasal dari organisasi tersebut ataupun dari *eksternal* yang bersal dari luar organisasi. Sedangkan, data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. Di lain pihak, data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. (Kuncoro, 2013)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui *website- website* resmi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendesa PDTT RI), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI), dengan objek penelitian seluruh Kabupaten di Indonesia dan kurun waktu selama 4 tahun (2015 – 2018).

### 3.6 Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. (Kuncoro, 2013) Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah masyarakat pedesaan seluruh Kabupaten di Indonesia.

#### b. Sampel

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan ialah *Probability sampling*, pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (daerah) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi, *simple random*, *proportionate stratified random*, *disproportionate stratified random* dan *area (cluster) sampling*. Karena obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalkan penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten maka digunakan teknik *cluster sampling*. Analisis *cluster* adalah istilah yang diberikan pada sebuah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi objek atau individu yang serupa dengan memperhatikan beberapa kriteria. Tujuan utama analisis *cluster* adalah untuk menggolongkan individu atau objek yang berhubungan secara *mutually exclusive* ke dalam jumlah yang lebih kecil. (Kuncoro, 2013)

Untuk menentukan kabupten mana yang akan dijadikan sumber data, maka dilakukan pengambilan sampelnya berdasarkan jumlah area (*cluster*) yaitu sebanyak 6 area yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, NTB dan NTT, Pulau Kalimantan ,Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua dan Maluku.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten se-Indonesia yang berjumlah 415 Kabupaten. Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi yaitu jumlah seluruh karyawan sebanyak 415 Kabupaten dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin (Sugiyono, 2011).

Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \dots\dots\dots(3-1)$$

Dimana:

- n = Ukuran sampel/jumlah responden
- N = Ukuran populasi
- e = Presentase derajat kesalahan yang masih bisa ditolerir

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 415 Kabupaten, sehingga persentase kelonggaran yang digunakan adalah 5% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{415}{1 + 415(0,05)^2} = 36 \text{ Kabupaten}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, sampel yang didapat berjumlah 36 Kabupaten. Jumlah sampel yang telah didapat selanjutnya

dibagi menjadi 6 *cluster*. Oleh karena itu, Pulau Sumatera akan berjumlah 9 Kabupaten, Pulau Jawa sebanyak 10 Kabupaten, Pulau Bali, NTB dan NTT sebanyak 4, Pulau Kalimantan sebanyak 5 Kabupaten, Pulau Sulawesi sebanyak 5 Kabupaten, sedangkan Pulau Papua dan Maluku sebanyak 3 Kabupaten.

**Tabel 3.2**

**Pembagian Kabupaten per Pulau di Indonesia Dengan Menggunakan *Cluster Sampling***

Area ( <i>Cluster</i> )	Jumlah Kabupaten
Pulau Sumatera	9 Kabupaten
Pulau Jawa	10 Kabupaten
Pulau Bali, NTB, NTT	4 Kabupaten
Pulau Kalimantan	5 Kabupaten
Pulau Sulawesi	5 Kabupaten
Pulau Papua dan Maluku	3 Kabupaten

### 3.7 Teknik Analisis Tujuan Penelitian

#### 3.7.1 Analisis Ekonomi Deskriptif perkembangan kebijakan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi Pedesaan di Kabupaten se- Indonesia

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kebijakan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi Pedesaan di Kabupaten se-Indonesia.

### 3.7.2 Analisis Model Ekonometrika

#### A. Model Estimasi

Penelitian ini mengenai pengaruh dari kebijakan Dana Desa peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan objek penelitian seluruh kabupaten di Indonesia dan juga dengan kurun waktu dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Maka model ekonometrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model ekonometrik: pengaruh Dana Desa dalam meningkatkan IPM.

$$IPM_{rt} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot DD_{rt} + \alpha_2 \cdot PDRB_{rt} + \alpha_3 \cdot BD_{rt} + \varepsilon_{rt} \dots\dots\dots(3-2)$$

Dimana:  $IPM_{rt}$  = Indeks Pembangunan Manusia pada tahun

$DD_{rt}$  = Dana Desa pada tahun t

$PDRB_{rt}$  = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

$BD_{rt}$  = Belanja Daerah pada tahun t

$\alpha_0$  = Koefisien regresi (konstanta)

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  = Parameter dari setiap variabel bebas

$\varepsilon_{rt}$  = *Error Terms*

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan diperoleh untuk menguji hipotesa penelitian.

#### B. Metode Estimasi

Penelitian ini mengenai kebijakan Dana Desa terhadap pengembangan ekonomi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat se-Kabupaten di Indonesia. Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat

memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika.

Asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linear dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata disturbance tern = 0
2. Tidak terdapat Korelasi serial (*serial auto correlation*) diantara disturbance tern  $COV(\epsilon_t, \epsilon_j) = 0 : I \neq j$
3. Sifat momocidentecity dari disturbance tern  $Var(\epsilon^i) = \sigma^2$
4. Covariance antar  $\epsilon^i$  dari setiap variabel bebas (x) = 0 setiap variabel bebas (x) = 0
5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah disesifikasi atau diformulasikan.
6. Tidak terdapat *collinearity* antara variabel-variabel bebas. Artinya, variabel-variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya.
7. Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (*asumsi gauss-markov*), maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (*best linear unbiased estimator*). (Kuncoro, 2013)

## C. Tahapan Analisis

### 1) Penaksiran

#### a) Korelasi

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya suatu hubungan linier antara variabel DD, PDRB, dan BD terhadap IPM. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf  $r$  dimana bervariasi antara  $-1$  sampai  $+1$ . Nilai  $r$  mendekati  $-1$  atau  $+1$  menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut nilai  $r$  yang mendekati  $0$  mengindikasikan lemahnya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda  $+$  (positif) dan  $-$  (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jika bernilai  $+$  (positif) maka variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang searah, dalam arti lain peningkatan DD, PDRB, dan BD akan bersamaan dengan peningkatan IPM dan begitu juga sebaliknya. Jika bernilai  $-$  (negatif) artinya korelasi antara kedua variabel tersebut berlawanan. Penurunan nilai DD, PDRB, dan BD akan bersamaan dengan penurunan IPM.

#### b) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Gujarati (Kuncoro, 2013) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi ( $R^2$ ) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data,  $R^2$  menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif

digunakan *corrected* atau adjusted  $R^2$  yang dirumuskan:

$$\text{Adjusted } R^2 = 1 - R^2 - \left( \frac{-1}{n-k} \right) \dots \dots \dots (3-3)$$

Dimana: D : koefisien determinan

n : jumlah sampel

k : jumlah variabel independen

## 2) Pengujian

### a) Uji Statistik t atau Uji Parsial

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara *individual* dalam menerangkan variasi variabel terikat. (Kuncoro, 2013)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh DD, PDRB, dan BD secara individual terhadap IPM. Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah – langkah pengujian:

#### 1. Hipotesa

- DD

$H_0 : \alpha_1 = 0$  (DD tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM)

$H_0 : \alpha_1 \neq 0$  (DD berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM)

- PDB

$H_0 : \alpha_2 = 0$  (PDB tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM)

$H_0 : \alpha_2 \neq 0$  (PDB berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM)

- BD



$H_0 : \alpha_3 = 0$  (BD tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM)

$H_0 : \alpha_3 \neq 0$  (BD berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM)

## 2. Uji statistik

Dengan cara menghitung nilai t dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\alpha_i}{se \alpha_i} \dots\dots\dots(3-4)$$

dimana:  $\alpha_i$  : koefisien regresi

$se$  : standar error dibandingkan dengan  $t_{tabel} = \pm t (\alpha/2, n-1)$

## 3. Kriteria Uji :

Terima  $H_0$  jika  $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ , hal lain tolak  $H_0$  Atau dalam distribusi kurva normal t



**Gambar 3.1 Grafik Kriteria Pengujian Hipotesis**

Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai  $sig < \alpha = 5\%$

## 4. Kesimpulan

Sesuai kriteria uji maka terima  $H_0$ .

### b) Uji Statistik F atau Uji Simultan

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas

dimasukkan dalam mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. (Kuncoro, 2013)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pada model ekonometrik menunjukkan apakah DD, PDRB, dan BD secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel IPM.

Langkah – langkah pengujian:

1. Hipotesa

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$  (DD, PDB, KM, BN secara bersama- sama berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM)

$H_a : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 \neq 0$  (DD, PDB, KM, BN secara bersama-sama berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM)

2. Uji Statistik F:

$$F = \frac{R^2 K - 1}{(1 - R^2)(N - K)} \dots \dots \dots (3-5)$$

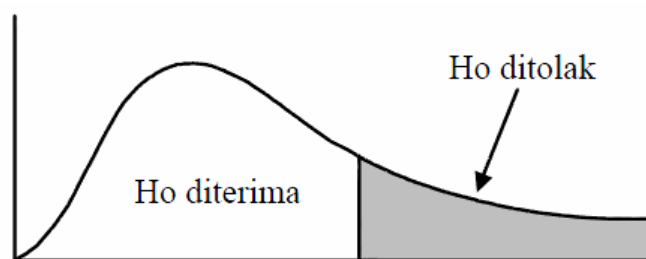
Dimana:

K : Jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N : Jumlah observasi Dibanding dengan  $F_{tabel} = F(\alpha, n - K - 1)$

3. Kriteria uji:

Terima  $H_0$  jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , hal lain tolak  $H_0$ . Atau dalam distribusi kurva F



**Gambar 3.2 Grafik Kriteria Pengujian Hipotesis**

Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai  $\text{sig} < \alpha = 5\%$

#### 4. Kesimpulan

Sesuai kriteria uji maka terima  $H_0$ .

#### c) Uji Asumsi Klasik

Metode OLS mendapatkan nilai *estimator* yang diharapkan dapat memenuhi sifat *estimator* OLS yang BLUE (*Blue Linear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas)
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas)
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

##### a. Multikolinearitas

Multikolinearitas berhubungan dengan situasi dimana ada linier baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinearitas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpecah (Gujarati, 2003).

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel

penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *auxiliary regression* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika  $R^2$  regresi persamaan utama lebih dari  $R^2$  regresi *auxiliary* maka didalam model ini tidak terjadi multikolinearitas.

b. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisisennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “*reliable*” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji *White*. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai  $R^2$  yang didapat digunakan untuk menghitung  $\chi^2$ , dimana  $\chi^2 = n \cdot R^2$  (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability *Observation R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

c. Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain variabel gangguan tidak acak. Faktor-faktor yang

menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson Test. Dimana apabila  $d_i$  dan  $d_u$  adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada  $2 < DW < 4-d_u$  maka autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Gujarati, 2003).

#### d) Uji Hausman (Pemilihan Model Regresi)

Uji yang digunakan untuk menentukan model regresi pada data panel yaitu *Fixed Effect* atau *Random Effect*, maka selanjutnya yang dilakukan uji signifikan antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect* untuk mengetahui model mana yang lebih tepat untuk digunakan, pengujian ini disebut dengan Uji Hausman.

Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang akan digunakan. Pengujian Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

$H_0$  : *Random Effect Model*

$H_a$  : *Fixed Effect Model*

Uji Hausman akan mengikuti distribusi chi-squares sebagai berikut:

$$m = q' \text{Var}(q')^{-1} q'$$

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree of freedom sebanyak  $k$ , dimana  $k$  adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka  $H_0$  ditolak dan model

yang tepat adalah model *Fixed Effect*, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka, model yang tepat adalah model *Random Effect*.

#### 1. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Efek tetap disini dimaksudkan bahwa satu objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*).

Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu (*dummy*). Oleh karena itu, model ini sering disebut juga dengan *Least Square Dummy Variabels (LSDV)*.

#### 2. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect Model*)

Efek random digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode efek random menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. Namun untuk menganalisis metode efek random ini ada satu syarat, yaitu objek data silang harus lebih besar daripada banyaknya koefisien.

### **3.7.3 Analisis Tipologi Klassen**

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata

pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*)

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah Provinsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh

Daerah maju dan cepat tumbuh (*rapid growth region*) adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan IPM dan Dana Desa yang lebih besar dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat. Karena diperkirakan daerah ini akan terus berkembang dimasa mendatang.

2. Daerah maju tapi tertekan

Daerah maju tapi tertekan (*retarded region*) adalah daerah- daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

### 3. Daerah berkembang cepat

Daerah berkembang cepat (*growing region*) pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan IPM tinggi namun Dana Desa nya sedikit, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena itu dimasa mendatang daerah ini diperkirakan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

### 4. Daerah relatif tertinggal

Kemudian daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*) adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan IPM dan Dana Desa yang berada dibawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa didaerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya (Kuncoro, 2006)



**Tabel 3.3**  
**Tipologi Klassen**

PDRB per kapita ( $y$ )		
Laju Pertumbuhan ( $r$ )	$(y_i < y)$	$(y_i > y)$
$(r_i > r)$	Kuadran I: Daerah cepat maju dan cepat tumbuh	Kuadran II: Daerah maju tapi tertekan
$(r_i < r)$	Kuadran III: Daerah berkembang cepat	Kuadran IV: Daerah tertinggal

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Perkembangan Kebijakan Dana Desa di Indonesia**

##### **4.1.1 Kebijakan Otonomi Daerah**

Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU Nomor 1 tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil (resultante) dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonialisme. Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan badan perwakilan tiap daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan tiga jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas. Sehingga dalam kurun waktu tiga tahun belum ada peraturan pemerintahan yang mengatur mengenai penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daerah. Undang-undang ini berumur lebih kurang tiga tahun karena digantidengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta tiga tingkatan daerah yaitu provinsi, kabupaten/kota besar dan desa/kota kecil. Mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan Undang-undang tentang pembentukan, telah dirinci lebih lanjut pengaturannya melalui peraturan

pemerintahan tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan tertentu kepada daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999. Dari penegertian tersebut tampak bahwa daerah di beri hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingna sendiri. Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan terutama mngeola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat unuk mengesahkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU nomer 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejalan dengan di berlakukanya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jaawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian di harapkan masingmasing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tahun 1998 kekuasaan orde baru berakhir. Tuntutan demokrasi dan pemberdayaan daerah menjadi sangat kuat. Pada masa Presiden Habibie (1999) dikeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan atas UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kedua UU tersebut maka otonomi daerah dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan yang dimilikinya, termasuk konsekuensi kewajibankewajibannya, dengan tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Meskipun sudah dijalankan sejak era Orde Lama, ada hal yang membedakan pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi saat ini. Jika sebelumnya otonomi daerah diletakkan di level provinsi, maka desentralisasi fiskal yang dijalankan saat ini justru menitikberatkan penyerahan kewenangan di level kabupaten/kota demi memperpendek rentang birokrasi. Di sisi lain, desentralisasi fiskal juga dimaksudkan sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk menciptakan aspek kemandirian dalam memenuhi aspek penciptaan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Karenanya, seluruh fungsi kewenangan diserahkan kepada daerah, kecuali di 5 bidang kewenangan yakni keuangan dan moneter, pertahanan dan keamanan, sistem peradilan, keagamaan, dan politik luar negeri yang masih menjadi urusan pemerintah pusat. Sebelum munculnya kebijakan desentralisasi fiskal, dana transfer ke daerah sangat terbatas yaitu hanya mencapai 18 persen dari belanja APBN 2000. Sedangkan setelah adanya kebijakan desentralisasi fiskal, alokasi transfer ke daerah yang masuk APBD meningkat cukup besar mencapai 33 persen dari belanja APBN 2010.

Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan hal yang spesial yang dimiliki oleh daerah lokal yang ada di masyarakat masing-masing daerah. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah daerah bisa mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata sehingga juga bisa mendorong perekonomian yang ada di daerah itu. Dengan melakukan otonomi

daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya dari pada pemerintah pusat.

#### **4.1.2 Kebijakan Desentralisasi Fiskal**

Sejak tahun 2001, kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia telah dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2001 bertumpu pada alokasi pusat kepada daerah yang dikenal sebagai dana perimbangan. Selama hampir 10 (sepuluh) tahun berjalannya desentralisasi fiskal, telah dialokasikan secara signifikan dana perimbangan ke daerah, dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), baik yang berasal dari pajak maupun sumber daya alam.

Pada hakikatnya, Dana Perimbangan dapat ditujukan untuk menurunkan ketimpangan fiskal vertikal (atau ketimpangan antar tingkat pemerintahan), maupun horizontal (atau ketimpangan antar pemerintahan daerah). Dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, seperti telah dijelaskan sebelumnya, dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi yang didesentralisasikan. Sementara itu, dana transfer antar pemerintahan daerah dimungkinkan untuk mengakomodasi masalah eksternalitas, kerjasama antardaerah, bantuan dari daerah surplus ke daerah lainnya, serta mengakomodasi ketimpangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu jenis transfer dari Pusat ke Daerah untuk tujuan khusus, sehingga dalam literatur keuangan negara dikategorikan dalam kategori bantuan spesifik, atau bantuan bersyarat (tied, conditional, or categorical grant). Sebenarnya terdapat dua jenis specific grants,

yaitu *matching grants* dan *non-matching grants*. Dalam kasus *matching grants*, Daerah penerima harus ikut berkontribusi (menyediakan dana pendamping), sedangkan *non-matching grants* tidak mengharuskan Daerah penerima menyediakan kontribusi. Di Indonesia, Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggap sebagai *matching grants* karena menurut Ayat 1 Pasal 41 Undang-Undang (UU) 33/2004, Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK. Meskipun demikian, menurut Ayat 3 dalam Pasal 41 yang sama, ada toleransi yang menyatakan bahwa Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping. Namun toleransi tersebut sekarang sulit terjadi karena pengertian kemampuan fiskal tertentu adalah jika total belanja pegawai Daerah penerima minimal sama dengan penerimaan umum APBD.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah sesuai asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (*horisontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*).

#### **4.1.3 Analisis Perkembangan Transfer ke Daerah pada APBN**

Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah tercapainya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah adalah terjadinya keseimbangan untuk setiap tingkatan pemerintahan antara proporsi beban belanja dengan proporsi sumber penerimaan. Syarat untuk mengukur beban belanja setiap tingkatan pemerintahan harus didasarkan kepada pembagian urusan yang jelas, baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Untuk melakukan pengukuran terhadap kondisi perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, maka dipergunakan data-data keuangan, baik Pemerintah Pusat maupun juga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 dana transfer ke daerah terdiri dari: (1) Dana Perimbangan; dan (2) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana otonomi khusus terdiri atas dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat serta dana otonomi khusus untuk NAD. Sementara



untuk komponen dana penyesuaian yang bersifat *ad-hoc*, terdiri atas beberapa jenis dana yang penamaannya mengalami perubahan/penambahan setiap tahun anggaran.

Dana Transfer ke Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Awal mulanya Dana Desa direncanakan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Periode kedua yaitu pada tahun 2012, akan tetapi Dana Desa masih bergabung dengan dana Transfer ke Daerah. Dikeluarkannya Dana Desa berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dialokasikan dana bantuan kepada Desa.

Pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya percepatan penyaluran dana Transfer ke Daerah dan mendorong pelaksanaan atau realisasi belanja pemerintah daerah. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong agar proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD dapat dilakukan secara tepat waktu guna mempercepat realisasi belanja daerah. Hal ini perlu dilakukan karena keterlambatan penetapan Perda APBD dikhawatirkan akan mengakibatkan penumpukkan dana yang belum terpakai, sehingga cenderung ditempatkan ke dalam bentuk investasi jangka pendek, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) melalui Bank Pembangunan Daerah.

**Tabel 4.1****Besaran Transfer ke Daerah Tahun 2001-2010 (Triliun Rupiah)**

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Penerimaan APBN</b>	263,2	301,9	336,2	349,3	379,6	621,6	720,4	779,2	984,8	948,1
<b>Total Transfer ke Daerah</b>	84,8	100,0	119,1	120,1	132,4	220,4	259,6	281,5	320,7	322,4
<i>DAU</i>	60,5	69,1	77,0	82,1	88,8	145,7	164,8	179,5	186,4	192,5
(Penyesuaian DAU)	3,1	2,1	2,3	1,0	0,8	0,3	0,8	0,2		11,0
<i>DAK</i>	0,9	0,8	2,6	3,1	4,3	11,6	17,1	21,2	24,8	21,1
<i>DBH</i>	20,3	24,6	27,9	26,9	31,2	59,4	68,5	66,1	85,7	81,4
<i>Otsus &amp; Penyesuaian</i>	0,0	3,4	9,4	6,9	7,2	3,5	8,5	14,4	23,7	16,4
Otsus		1,4	1,5	1,6	1,8	2,9	4,0	7,5	8,9	9,1
Dana Penyesuaian		2,1	7,9	5,2	5,5	0,6	4,4	6,9	14,9	7,3

Sumber: Kementerian Keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Sejak dilaksanakannya kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah pada tahun 2001, selain telah terjadi peningkatan dana yang dialokasikan kepada Daerah, juga terjadi penambahan komponen dalam alokasi belanja ke Daerah. Apabila pada tahun 2001 alokasi belanja ke daerah baru mencakup Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), maka sejak tahun 2002, alokasi belanja ke Daerah juga mencakup Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) untuk Provinsi Papua (sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang 21/2001), dan Dana Penyeimbang (sejak 2004 disebut Dana Penyesuaian) yang dialokasikan kepada daerah-daerah yang menerima DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari besarnya dana yang dialokasikan ke daerah, apabila dalam tahun 2001 realisasi belanja ke daerah mencapai Rp 84,8 triliun (5,4% dari PDB), maka dalam tahun 2006 realisasi belanja ke daerah mencapai Rp 220,4 triliun (6,8% PDB), atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 29,9% per tahun. Selanjutnya, dalam APBN tahun 2010, alokasi belanja ke daerah ditetapkan sebesar Rp 322,4

triliun. Kecenderungan meningkatnya jumlah transfer ke daerah ini perlu dicermati apakah memang merupakan kebijakan yang direncanakan atau justru terjadi karena kurang baiknya perencanaan.

Kebijakan serta alokasi transfer ke daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas, penurunan kesenjangan antar daerah, pengentasan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan juga merupakan implementasi nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan), namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

#### **4.1.4 Analisis Perkembangan Dana Desa**

Untuk pertama kalinya, Dana Desa dipisah dari dana Transfer ke Daerah. Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan untuk

pertama kali Program Dana Desa pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 20,76 triliun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

APBN merupakan instrumen kebijakan penting untuk mencapai tujuan nasional dan pelaksanaan program Nawacita. Pemerintah terus berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, dengan fokus prioritas pembangunan nasional pada 2018, yaitu: (1) pembangunan infrastruktur; (2) pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antar-pendapatan dan antarwilayah; serta (3) perluasan kesempatan kerja.

Tabel 4.2

## Realisasi Pengeluaran Negara Tahun 2014-2018 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Pengeluaran Negara</b>	1.777.182	1.806.515	1.864.275	2.133.295	2.220.657
<b>Pengeluaran Pemerintah Pusat</b>	1.203.577	1.183.303	1.154.018	1.366.956	1.454.494
<b>Belanja Kementrian dan Lembaga</b>	577.164	732,137.10	684.204	798.585	847.435
<b>Belanja non Kementrian dan Lembaga</b>	626.412	451,166.60	469.813	568.371	607.059
<b>Pengeluaran untuk Daerah</b>	573.703	623,139.60	710.256	766.339	766.162
<b>Transfer ke daerah</b>	573.703	602.373	663.577	706.339	706.162
Dana Perimbangan	555.747	583.045	639.765	678.596	676.603
Dana Intensif Daerah	1.387	1.664	5.000	7.500	8.500
Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	16.567	17.663	18.811	20.243	21.059
<b>Dana Desa</b>	-	<b>20.766</b>	<b>46.679</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Sejak 2014-2018 kualitas pengeluaran Negara dinilai cukup baik karena setiap tahun mengalami peningkatan. Transfer ke daerah pada tahun 2014 hanya sebesar Rp. 573 triliun sedangkan tahun 2015 meningkat cukup drastis yaitu mencapai Rp. 602 triliun. Tahun 2015 sampai 2018 cukup berbeda dibandingkan dengan 2014 dikarenakan pada tahun 2014 belum adanya Dana Desa. Pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan Dana Desa mulai tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 20 triliun

dan meningkat terus menerus setiap tahunnya yang mencapai Rp. 60 triliun pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, APBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun. Dari angka belanja tersebut terdapat belanja yang ditujukan untuk transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp766,2 triliun. Belanja transfer ke daerah dan Dana Desa mempunyai fokus utama untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dalam penyalurannya, belanja transfer ke daerah dan dana desa menggunakan basis kinerja.

Dana transfer ke daerah dan dana desa terbagi menjadi dua pendanaan yaitu transfer ke daerah sebesar Rp706,1 triliun dan dana desa sebesar Rp60,0 triliun. Dana transfer ke daerah terbagi menjadi komponen-komponen sebagai berikut:

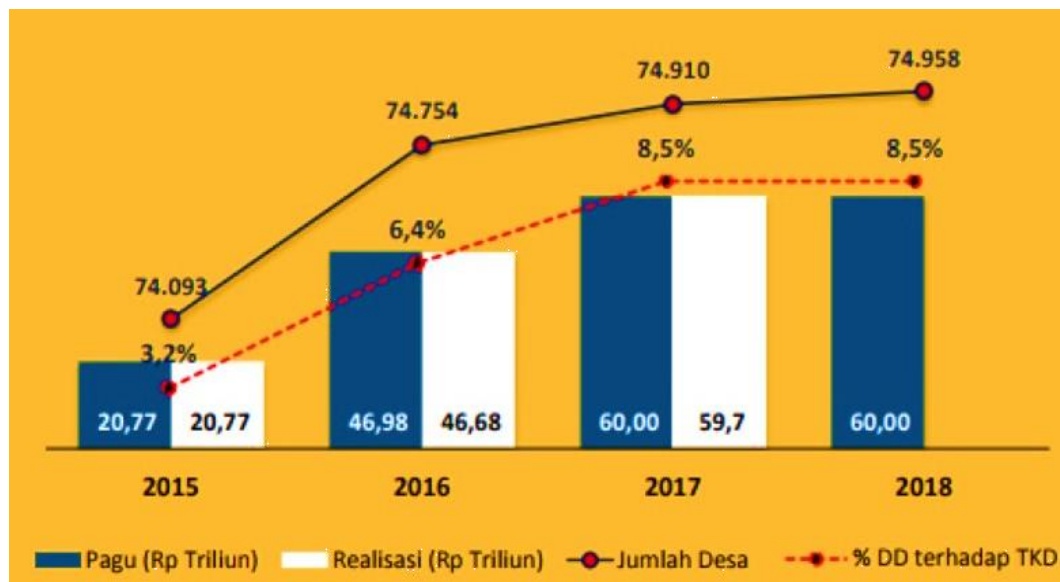
- Dana Bagi Hasil (DBH), dengan pagu dana sebesar Rp89,2 triliun. Kebijakan terbaru pada komponen DBH adalah penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk 5 program sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan dan mendukung program jaminan kesehatan nasional. Selain itu DBH Dana Reboisasi, selain digunakan untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) juga penanganan kebakaran hutan, penanganan batas kawasan dan pembenihan;
- Dana Alokasi Umum (DAU), dengan pagu dana sebesar Rp401,5 triliun. Kebijakan untuk tahun 2018 antara lain pagu yang bersifat dinamis dan bobot wilayah laut menjadi 100%;

- Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dengan pagu dana sebesar Rp62,4 triliun. DAK Fisik digunakan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pelayanan publik di daerah. Selain itu dalam DAK Fisik terdapat afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Pengalokasian DAK menggunakan mekanisme proposal based sesuai prioritas nasional;
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan pagu sebesar Rp123,5 triliun digunakan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa, Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,2 juta guru dan BOK untuk 9.785 Puskesmas.
- Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DIY, dengan dana sebesar Rp21,1 triliun digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.
- Dana Insentif Daerah (DID), dengan dana sebesar Rp 8,5 triliun. DID digunakan sebagai trigger dari pemerintah sebagai *reward* atas pemda yang berprestasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.
- Sedangkan Dana Desa mendapatkan pagu dana sebesar 60,0 triliun. Dalam pengalokasian Dana Desa formula dibuat semakin fokus dalam rangka pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan geografis, melalui: pemberian

afirmasi kepada desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, dan pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin

Dana Desa dikeluarkan dengan fokus untuk meningkatkan pemerataan keuangan antar daerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah yang selama ini terjadi, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan di Desa. Dana Desa dinilai akan lebih diperkuat pemanfaatannya agar dapat memperluas pembangunan di desa, baik sarana maupun prasarana, dengan berbasis kinerja.

Berdasarkan data yang dihimpun BPS, jumlah desa tertinggal semakin berkurang, melewati target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, yakni 5.000 desa tertinggal. Mayoritas desa di Indonesia berstatus berkembang, yakni 55.369 (73,40%) dari jumlah desa di 2018 yang sebanyak 74.958 desa. Desa yang sekarang masih tertinggal kebanyakan terdapat di Indonesia bagian timur.



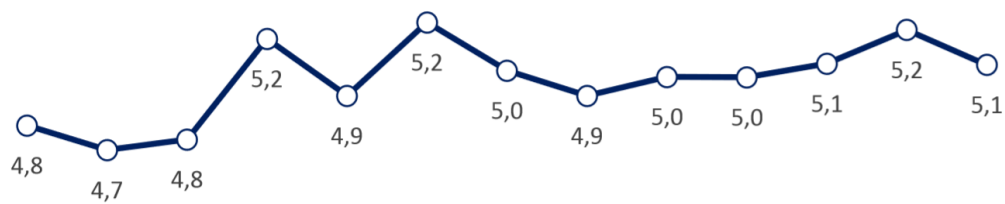
**Gambar 4.1 Perkembangan Dana Desa tahun 2015-2018**

Sumber: Kementerian Keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))



Dana desa menjadi salah satu kebijakan di pemerintahan Jokowi – JK. Total Dana Desa sejak tahun 2015 hingga 2018 sudah mencapai Rp 187,75 triliun yang realisasi anggarannya rata-rata hampir mencapai 100%. Pada tahun 2017 dan 2018 Dana Desa dikeluarkan sebesar 8,5 % dari anggaran Transfer ke daerah. Dengan meningkatnya Dana Desa pada setiap tahun, diharapkan kualitas pembangunan desa juga bisa ditingkatkan baik infrastruktur desa maupun sumber daya manusianya.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh se+ara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan ke-sejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan me-ngurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam pe-nyelenggaraan pemerintahan maupun pem-bangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.



Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
2015				2016				2017				2018

**Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I Tahun 2015- Triwulan I Tahun 2018 (persen)**

Sumber: Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Dilihat dari perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2018 tumbuh sebesar 5,1 persen (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2017 namun lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,2 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor perekonomian global yang terus tumbuh meskipun melambat serta meningkatnya harga komoditas. Dari sisi domestik, kinerja tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya investasi, ekspor yang tetap tumbuh, serta konsumsi masyarakat yang stabil.

Sejak pemerintahan Jokowi-JK, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sedikit demi sedikit. Itu dinilai karena munculnya nawacita yang membangun Indonesia melalui pinggiran, sehingga menurunkan tingkat kesenjangan antara perkotaan maupun pedesaan. Menurut Menteri Perekonomian RI, dengan adanya Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan seluruh desa yang tersebar di seluruh Indonesia dapat berkembang, mandiri, dan sejahtera. Dari total Dana Desa yang telah dialokasikan, sebesar 80 persen dibagi rata dan 20 persen itu dialokasikan sebagai dana tambahan atau afirmasi kepada desa yang miskin, tertinggal, dan terluar. Sehingga desa miskin dapat mengejar ketertinggalannya.

Jika Dana Desa dikelola baik maka berbagai potensi ekonomi desa akan tumbuh baik. Sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dari tahun 2015-2018 sebanyak Rp. 187 Triliun total Dana Desa yang sudah dikeluarkan pemerintahan pusat untuk desa.



**Gambar 4.3 Pemanfaatan Dana Desa**  
*Sumber: Kementerian Desa ([www.kemendesa.go.id](http://www.kemendesa.go.id))*

Dalam tiga tahun terakhir implementasi Dana Desa, data mencatat hasil yang signifikan. Dana desa telah membangun 191.600 kilometer jalan desa, 1.140.378 meter jembatan desa, 8983 unit pasar desa, 37.830 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 5.371 tambatan perahu, 4.157 unit embung, 58.981 unit irigasi, dan 19.526 unit sarana olahraga desa. Infrastruktur tersebut dibangun untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan yang bersifat

peningkatan kualitas hidup masyarakat desa yakni 192.974 unit penahan tanah, 959.569 unit air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 29.557.922 meter drainase, 50.854 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 24.820 unit Posyandu, dan 45.169 unit sumur. Program membuat MCK, air bersih, PAUD, Posyandu, turap, dan lainnya meningkatkan indeks pembangunan manusia di desa sehingga kualitas hidup masyarakat desa meningkat (Kemendes PDTT, 2018).

Untuk Tahun 2019, Kemenkeu sudah menyusun arah dan kebijakan Dana Desa tahun anggaran 2019. Pertama, meningkatkan pagu anggaran Dana Desa. Diperkirakan Dana Desa 2019 akan mengalami kenaikan menjadi Rp 70 triliun.

Kedua, menyempurnakan formulasi pengalokasian Dana Desa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa pada beberapa kegiatan prioritas desa, yaitu 3 – 5 kegiatan. Keempat, melanjutkan skema padat karya tunai dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik. Kelima, meningkatkan porsi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat.

Keenam, meningkatkan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menciptakan produk unggulan desa, dan memberikan kemudahan akses permodalan. Ketujuh, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa melalui kebijakan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan. Kedelapan, sinergi pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha. Kesembilan, melakukan penguatan atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Desa, kapasitas SDM perangkat desa, serta koordinasi, konsolidasi dan sinergi dari tingkat pemerintahan pusat, pemda, kecamatan hingga desa.

Tantangan terbesar pertama dalam pelaksanaan Dana Desa adalah bagaimana agar Dana Desa yang masuk ke desa tersebut dapat dibagi dengan adil kepada 415 Kabupaten sebanyak 74.958 Desa se-Indonesia. Mengingat tingginya keberagaman ukuran (jumlah penduduk, luas wilayah), tingkat kemiskinan dan tingkat kemajuan desa di Indonesia. UU Desa mengamankan agar anggaran desa yang bersumber dari APBN (Dana Desa) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

**Tabel 4.3**

**REKAPITULASI DANA DESA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2015-2018  
(Ribuan Rupiah)**

<b>PROVINSI</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Acch</b>	1707817995	3829751986	4892571795	4457512950	4955500482
<b>Bali</b>	185428984	416264690	537258505	531141963	630189586
<b>Banten</b>	352516368	791252019	1009506961	937180879	1092073316
<b>Bengkulu</b>	362962239	813896546	1035340413	945638279	1079418707
<b>Di Yogyakarta</b>	128076618	287695629	368567559	361894397	423785125
<b>Gorontalo</b>	179957839	403677978	513958123	540591708	636614465
<b>Jambi</b>	381560156	856771029	1090942601	1037674061	1234996168
<b>Jawa Barat</b>	1589711596	3568437985	4547513838	4823095418	5710074611
<b>Jawa Tengah</b>	2228889296	5002426341	6384442058	6737083091	7889431604
<b>Jawa Timur</b>	2214014855	4969123651	6339556181	6368745359	7441561392
<b>Kalimantan Barat</b>	537066678	1241607506	1616725259	1688279973	1854142720
<b>Kalimantan Selatan</b>	501119950	1125244835	1430375412	1316573429	1506337021
<b>Kalimantan Tengah</b>	403351015	904370668	1148904929	1144586424	1315657156
<b>Kalimantan Timur</b>	240542413	540759158	692420247	730928055	870119582
<b>Kalimantan Utara</b>	129874894	291096987	369938349	387688280	463268514
<b>Kep. Bangka Belitung</b>	91927560	206293612	261661579	264571725	309831614
<b>Kepulauan Riau</b>	79199724	177766079	228182536	221500941	261333056
<b>Lampung</b>	684727653	1536762050	1957487721	2091398105	2427111117

<b>Maluku</b>	334004517	754638987	961602798	964700076	1122509201
<b>Maluku Utara</b>	291071202	653455314	832406416	785606677	891604070
<b>NTB</b>	301797520	677494427	865014066	983185878	1181329455
<b>NTT</b>	812875565	1849353802	2360353320	2537837576	3020504603
<b>Papua</b>	1433226742	3385116457	4300947518	4284844848	5237503009
<b>Papua Barat</b>	449326962	1074690239	1364412395	1329719076	1516915258
<b>Riau</b>	445646965	999278616	1269305925	1254688851	1436685874
<b>Sulawesi Barat</b>	162019634	363558153	461094687	472270192	560226664
<b>Sulawesi Selatan</b>	635355795	1425595011	1820518240	1986216686	2351148984
<b>Sulawesi Tengah</b>	500301180	1124644395	1433826019	1363158368	1567950719
<b>Sulawesi Tenggara</b>	496077234	1126867317	1482032772	1411237132	1613817589
<b>Sulawesi Utara</b>	402546360	911498499	1161358872	1065411508	1210560814
<b>Sumatera Barat</b>	267003839	598637609	796538971	790787312	932325519
<b>Sumatera Selatan</b>	775043818	1780769519	2267261445	2309392954	2683946345
<b>Sumatera Utara</b>	1461156834	3293282206	4197972490	3874857829	4452049366
<b>TOTAL NASIONAL</b>	20766200000	46982080000	60000000000	60000000000	70000000000

Sumber: Kementerian Desa PDTT ([www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id))

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dialokasikannya Dana Desa pada APBN. Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp20.766,2 miliar dan realisasinya sebesar 100 persen dari pagu pada APBN-P yang ditetapkan di 2015. Dari 33 Provinsi penerima Dana Desa, 5 diantaranya akan mengantongi anggaran terbanyak. Provinsi itu antara lain, Jawa Tengah sebesar Rp 2,23 triliun, Jawa Timur Rp 2,21 triliun, Aceh akan menerima Rp 1,71 triliun, Jawa Barat senilai Rp 1,59 triliun dan Sumatera Utara sebesar Rp 1,46 triliun. Sementara lima Provinsi penerima dana desa terkecil, yakni Provinsi Kepulauan Riau Rp 79,19 miliar, Bangka Belitung Rp 91,93 triliun, Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 128,07 miliar, Kalimantan Utara Rp 129,87 miliar serta Rp 162,02 miliar ke Sulawesi Barat.

Pada 2016, realisasi Dana Desa adalah sebesar Rp46.679,3 miliar atau 99,36

persen dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp46.982,1 miliar. Dibandingkan 2015, realisasi Dana Desa 2016 meningkat sebesar 123,04 persen. Pertumbuhan realisasi dana desa terbesar berada di wilayah Maluku dan Papua yang meningkat sebesar 127,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2016, dana desa yang disalurkan ke wilayah timur Indonesia ini sebesar Rp5.697,88 miliar. Dengan jumlah desa sebanyak 8.832 desa, maka rata-rata dana yang diterima per desa adalah Rp645,14 juta.

Sedangkan, pertumbuhan realisasi dana desa terendah berada di wilayah Sulawesi dengan hanya tumbuh sebesar 114,75 persen. Realisasi dana desa yang disalurkan untuk wilayah ini pada 2016 sebesar Rp5.102,93 miliar. Untuk realisasi dana yang diterima per desa, rata-rata sebesar Rp483,55 juta pada 2016.

Pada 2017, Dana Desa yang dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp60 triliun atau meningkat sebesar 27 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Melihat persebarannya, anggaran untuk dana desa terbesar tetap di pulau Jawa dengan nilai Rp18.649,59 miliar, menyusul berikutnya adalah Sumatera sebesar 17.997,27 miliar rupiah. Kenaikan anggaran terbesar ada pada Sulawesi dan Maluku sebesar 34,09 persen dan Papua sebesar 31,23 persen dari tahun sebelumnya.

Provinsi yang mendapat dana desa terbesar pada 2018 adalah Jawa Tengah senilai Rp 6,7 triliun, diikuti Jawa Timur Rp 6,3 triliun, kemudian Aceh Rp 3,8 triliun. Lalu, Jawa Barat Rp 4,8 triliun, Aceh Rp 4,4 triliun, Papua Rp 4,2 triliun, serta Sumatera utara Rp 3,8 triliun. Dapat dilihat dari tahun 2015 sampai 2018 proporsinya yang masih terpusat di Pulau Jawa yaitu sebesar Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat selalu mengalami peningkatan sedangkan untuk Aceh dan Papua mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2018.

**Tabel 4.4****Pertumbuhan Dana Desa per Provinsi Tahun 2016-2019 (Persen)**

<b>Provinsi</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Aceh</b>	124.25	27.75	-8.89	11.17
<b>Bali</b>	124.49	29.07	-1.14	18.65
<b>Banten</b>	124.46	27.58	-7.16	16.53
<b>Bengkulu</b>	124.24	27.21	-8.66	14.15
<b>Di Yogyakarta</b>	124.63	28.11	-1.81	17.10
<b>Gorontalo</b>	124.32	27.32	5.18	17.76
<b>Jambi</b>	124.54	27.33	-4.88	19.02
<b>Jawa Barat</b>	124.47	27.44	6.06	18.39
<b>Jawa Tengah</b>	124.44	27.63	5.52	17.10
<b>Jawa Timur</b>	124.44	27.58	0.46	16.85
<b>Kalimantan Barat</b>	131.18	30.21	4.43	9.82
<b>Kalimantan Selatan</b>	124.55	27.12	-7.96	14.41
<b>Kalimantan Tengah</b>	124.21	27.04	-0.38	14.95
<b>Kalimantan Timur</b>	124.81	28.05	5.56	19.04
<b>Kalimantan Utara</b>	124.14	27.08	4.80	19.50
<b>Kep. Bangka Belitung</b>	124.41	26.84	1.11	17.11
<b>Kepulauan Riau</b>	124.45	28.36	-2.93	17.98
<b>Lampung</b>	124.43	27.38	6.84	16.05
<b>Maluku</b>	125.94	27.43	0.32	16.36
<b>Maluku Utara</b>	124.50	27.39	-5.62	13.49
<b>NTB</b>	124.49	27.68	13.66	20.15
<b>NTT</b>	127.51	27.63	7.52	19.02
<b>Papua</b>	136.19	27.05	-0.37	22.23
<b>Papua Barat</b>	139.18	26.96	-2.54	14.08
<b>Riau</b>	124.23	27.02	-1.15	14.51
<b>Sulawesi Barat</b>	124.39	26.83	2.42	18.62
<b>Sulawesi Selatan</b>	124.38	27.70	9.10	18.37
<b>Sulawesi Tengah</b>	124.79	27.49	-4.93	15.02
<b>Sulawesi Tenggara</b>	127.16	31.52	-4.78	14.35
<b>Sulawesi Utara</b>	126.43	27.41	-8.26	13.62
<b>Sumatera Barat</b>	124.21	33.06	-0.72	17.90
<b>Sumatera Selatan</b>	129.76	27.32	1.86	16.22
<b>Sumatera Utara</b>	125.39	27.47	-7.70	14.90
<b>TOTAL NASIONAL</b>	126.24	27.71	0.00	16.67

Pada tahun 2016, pertumbuhan Dana Desa mengalami peningkatan yang drastis mencapai 126% yaitu 2 kali lipat dari Dana Desa yang diberikan pada tahun



2015. Kawasan Timur Indonesia (KTI) mendapatkan Dana Desa yang cukup lebih besar dibandingkan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Rata-rata pertumbuhan Dana Desanya mencapai 130% keatas seperti Provinsi Kalimantan Barat, Papua, dan Papua barat. Kurangnya infrastruktur di wilayah itu menyebabkan ditingkatkannya Dana Desa di masing-masing provinsi tersebut.

Untuk tahun 2017 tidak mengalami peningkatan yang besar yaitu hanya 27% sebesar Rp. 60 Triliun dari Rp. 48 Triliun pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2018 pemerintah membuat kebijakan yang sama dari tahun sebelumnya yaitu total Dana Desa tetap sebesar Rp. 60 Triliun. Namun untuk penyebaran Dana Desa yang cukup berbeda, hampir rata-rata wilayah KBI mengalami penurunan sedangkan untuk wilayah KTI mengalami peningkatan, akan tetapi tidak sebesar dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah menilai masih terjadinya tingkat ketimpangan di wilayah timur Indonesia dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia. Oleh karena itu, Pembangunan infrastruktur perlu dilakukan di wilayah timur Indonesia dengan menambah Dana Desa hampir seluruh Provinsi di wilayah KTI.

Pada tahun 2019, total anggaran Dana Desa mencapai Rp. 70 Triliun yaitu mengalami pertumbuhan sebesar 16% dari tahun 2018. NTB, NTT dan Papua merupakan provinsi yang pertumbuhannya lebih besar dari pada provinsi lainnya. Peningkatan terjadi karena pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berbeda dari 3 tahun terakhir yaitu Dana Desa lebih banyak untuk bidang pembangunan infrastruktur publik Desa yang berkisar 83%-87%, sedangkan untuk bidang pemberdayaan hanya berkisar 7%-12%. Pada 2019, bidang pemberdayaan masyarakat akan ditingkatkan. Selain itu, Dana Desa akan mengarah pada peningkatan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes), serta memperkuat kapasitas perangkat desa dan pendamping desa untuk mendukung pengelolaan Dana Desa lebih yang lebih optimal, efektif, dan akuntabel.

Selama kurun waktu empat tahun terakhir, terlihat anggaran Dana Desa terus mengalami peningkatan. Peningkatan anggaran dan realisasi ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut disebutkan pemerintah secara bertahap akan meningkatkan alokasi dana desa dan pada 2017 ditargetkan alokasi Dana Desa mencapai 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Peningkatan Dana Desa ini juga menjadi indikasi komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

**Tabel 4.5**

**Pembagian Kabupaten per Pulau di Indonesia Dengan Menggunakan Teknik *Cluster Sampling***

<b>Area (Cluster)</b>	<b>Kabupaten (Provinsi)</b>
<b>Pulau Sumatera</b>	Kab. Aceh Barat (Aceh) Kab. Deli Serdang (Sumatera Utara) Kab. Padang Pariaman (Sumatera Barat) Kab. Ogan Ilir (Sumatera Selatan) Kab. Rokan Hulu (Riau) Kab. Karimun (Kepulauan Riau) Kab. Lampung Selatan (Lampung) Kab. Kerinci (Jambi) Kab. Bengkulu Utara (Bengkulu)
<b>Pulau Jawa</b>	Kab. Klaten (Jawa Tengah) Kab. Magelang (Jawa Tengah) Kab. Semarang (Jawa Tengah) Kab. Bekasi (Jawa Barat) Kab. Bogor (Jawa Barat) Kab. Sleman (D.I. Yogyakarta) Kab. Banyuwangi (Jawa Timur) Kab. Malang (Jawa Timur) Kab. Kediri (Jawa Timur) Kab. Tangerang (Banten)

<b>Pulau Bali, NTB dan NTT</b>	Kab. Badung (Bali) Kab. Buleleng (Bali) Kab. Bima (NTB) Kab. Kupang (NTT)
<b>Pulau Kalimantan</b>	Kab. Ketapang (Kalimantan Barat) Kab. Banjar (Kalimantan Selatan) Kab. Kapuas (Kalimantan Tengah) Kab. Bulungan (Kalimantan Utara) Kab. Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur)
<b>Pulau Sulawesi</b>	Kab. Gowa (Sulawesi Selatan) Kab. Poso (Sulawesi Tengah) Kab. Wakatobi (Sulawesi Tenggara) Kab. Mamasa (Sulawesi Barat) Kab. Minahasa (Sulawesi Utara)
<b>Pulau Papua dan Maluku</b>	Kab. Tolikara (Papua) Kab. Merauke (Papua) Kab. Maluku Tengah (Maluku)

Jumlah Kabupaten di Indonesia sebanyak 415 Kabupaten, dalam penelitian memakai teknik pengambilan sampel kluster dari total 415 Kabupaten se-Indonesia sampelnya menjadi 36 Kabupaten dengan masing-masing Pulau Sumatera sebanyak 9 Kabupaten; Pulau Jawa sebanyak 10 Kabupaten, Pulau Bali, NTT, NTB sebanyak 4 Kabupaten; Pulau Kalimantan sebanyak 5 Kabupaten; Pulau Sulawesi sebanyak 5 Kabupaten; Pulau Papua dan Maluku sebanyak 3 Kabupaten. Dalam *sampling* penelitian ini, Pulau Jawa memiliki sampel kabupaten sebanyak 10 Kabupaten yang merupakan pulau terbanyak yang memiliki kabupaten, karena Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk hampir mencapai 160 juta jiwa yaitu sekitar 60% dari penduduk Indonesia. Sedangkan kedua terbanyak sampel kabupaten penelitian ini yaitu Pulau Sumatera dengan 9 Kabupaten. Ini dikarenakan Pulau Sumatera memiliki jumlah penduduk kedua terbesar di Indonesia yaitu mencapai 57 juta jiwa. Selanjutnya untuk pulau Sulawesi sebesar 19 juta jiwa (7,34 %), Kalimantan 15 juta jiwa (6,07 %), lalu Pulau Bali dan Nusa Tenggara 14 juta jiwa. Pulau dengan

penduduk kecil yaitu Papua 4,2 jiwa (1,60%) dan Maluku 2,9 juta penduduk (1,13%).

Pulau Papua memiliki jumlah penduduk paling kecil namun mendapat Dana Desa yang cukup besar. Pemerintah menilai wilayah timur Indonesia sangat memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Secara tidak langsung akan berdampak pada tingkat kualitas hidup masyarakat di wilayah timur Indonesia.

**Tabel 4.6**

**Rincian Dana Desa Per Kabupaten Se-Indonesia Berdasarkan Teknik  
Sampling Cluster (Ribuan Rupiah)**

<b>Area (Cluster)</b>	<b>KAB/PROVINSI</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pulau Sumatera	Kab. Aceh Barat (Aceh)	84303641	189083713	240736847	220833293	249482526
	Kab. Deli Serdang (Sumatera Utara)	105940761	237763644	303060286	271906373	306386948
	Kab. Padang Pariaman (Sumatera Barat)	18823668	42269545	84644728	81944437	95038398
	Kab. Ogan Ilir (Sumatera Selatan)	61530628	137920919	177844067	175831559	204595806
	Kab. Rokan Hulu (Riau)	39425763	88205480	112016303	119456777	139861061
	Kab. Karimun (Kepulauan Riau)	12272922	27549427	35818950	35444527	41812032
	Kab. Lampung Selatan (Lampung)	73656914	165323834	210513550	230459223	261327894
	Kab. Kerinci (Jambi)	74743267	167634278	213334035	189579503	212339214
	Kab. Bengkulu Utara (Bengkulu)	58318640	166310259	130594550	146743965	169662351
Pulau Jawa	Kab. Klaten (Jawa Tengah)	108674969	243866425	311087447	321520294	374660994
	Kab. Magelang (Jawa Tengah)	101155122	226980301	289613899	329260677	383071777
	Kab. Semarang (Jawa Tengah)	57840951	129797974	165688573	158450698	181931854

	Kab. Bekasi (Jawa Barat)	60185546	133641329	170420113	197271667	241022957
	Kab. Bogor (Jawa Barat)	130262061	292555382	371999170	402984941	488434210
	Kab. Sleman (D.I. Yogyakarta)	28048816	63014717	80855810	83666949	99035176
	Kab. Banyuwangi (Jawa Timur)	59888614	134467216	173183366	171594506	200471705
	Kab. Malang (Jawa Timur)	109423772	245547356	312979737	320340658	365827590
	Kab. Kediri (Jawa Timur)	97418474	218640097	278633039	272006205	310974159
	Kab. Tangerang (Banten)	75128048	168759814	215671732	241697257	280581836
Pulau Bali, NTT, dan NTB	Kab. Badung (Bali)	13826342	31046783	40315619	42439183	52584767
	Kab. Buleleng (Bali)	36812689	82620493	105860971	106882607	124026738
	Kab. Bima (NTB)	54246373	121722136	155258138	156526147	185618739
	Kab. Kupang (NTT)	44657895	100747060	128306880	135682206	165133602
Pulau Kalimantan	Kab. Ketapang (Kalimantan Barat)	68620651	161144686	203513692	216748524	255830330
	Kab. Banjar (Kalimantan Selatan)	73258762	164329907	209154295	188566844	213261986
	Kab. Kapuas (Kalimantan Tengah)	58492211	131152337	166874003	159989775	183958547
	Kab. Bulungan (Kalimantan Utara)	22248322	49850296	63362696	67596565	83963363
	Kab. Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur)	54496584	122194888	154651907	159509384	185361774
Pulau Sulawesi	Kab. Gowa (Sulawesi Selatan)	35072370	100250326	78741410	124634770	147622452
	Kab. Poso (Sulawesi Tengah)	39300655	87568952	111476286	110974868	129386922
	Kab. Wakatobi (Sulawesi Tenggara)	21225856	47639643	60664843	57413115	66406147
	Kab. Minahasa (Sulawesi Utara)	59997140	134603252	171641516	151906617	170062089
	Kab. Mamasa (Sulawesi Barat)	45245426	101492104	128900175	123890679	144159731
Pulau Papua dan Maluku	Kab. Tolikara (Papua)	142664313	320044266	406528297	365435608	419512047
	Kab. Merauke (Papua)	54227836	120370841	150950492	181796791	220530160
	Kab. Maluku Tengah (Maluku)	52081977	116853370	148929560	152474270	175993709

Sumber: Kementerian Desa PDTT ([www.kemendesa.go.id](http://www.kemendesa.go.id)), data diolah

Berdasarkan sampel diatas, Dana Desa paling besar di pulau Sumatera yaitu Kab. Deli Serdang dengan total sebesar Rp. 918.977.450.948 Milliar. Untuk pulau Jawa, Bali, NTT dan NTB yaitu Kab. Klaten dengan total sebesar Rp. 985.523.795.994 Milliar. Dan untuk pulau Kalimantan, Kabupaten yang memperoleh Dana Desa terbesar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya yaitu Kab. Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat dengan total sebesar Rp. 650.283.383.330 Milliar. Di pulau Sulawesi, Kab. Bone merupakan kabupaten yang memperoleh Dana Desa terbesar dengan total Dana Desa mencapai Rp. 486.321.328 Milliar.

Pulau Papua, Kab. Tolikara mendapatkan Dana Desa terbesar yaitu mencapai 1.235.092.001.047 Trilliun. Kab. Tolikara merupakan kabupaten dengan total Dana Desa terbesar sepanjang adanya kebijakan Dana Desa dikeluarkan. Akan tetapi, masih kurang efektifnya penggunaan Dana Desa di Kab. Tolikara. Adanya indikasi penyalahgunaan Dana Desa di Kab. Tolikara sehingga tersendatnya pengembangan ekonomi pedesaan di kabupaten tersebut.

Kabupaten Klaten dinilai cukup sukses untuk memanfaatkan Dana Desa yang telah diberikan. Salah satu desa yang sangat menonjong yaitu Desa Ponggok dengan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 10,3 Milliar pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 2017 mencapai Rp. 15 milliar. Salah satu tempat wisata hasil anggaran dana desa di Desa Ponggok yaitu Umbul Ponggok. Umbul Ponggok merupakan potensi ekonomi yang dimanfaatkan oleh desa tersebut. Oleh karena itu, Desa yang ada di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi lokalnya.

Sesuai dengan Nawacita butir ketiga yakni ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan’ diwujudkan dalam berbagai pendekatan mengatasi ketimpangan. Maka Kebijakan Dana Desa diharapkan mampu mendongkrak perekonomian di daerah sehingga dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi di wilayah pedesaan. Membangun dari desa adalah salah satu komitmen Pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Pembangunan Perdesaan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

**Tabel 4.7**

**Rincian Pertumbuhan Dana Desa Per Kabupaten Se-Indonesia Berdasarkan Teknik *Sampling Cluster* (persen)**

<b>Area (Cluster)</b>	<b>KABUPATEN/PROVINSI</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pulau Sumatera	Kab. Aceh Barat (Aceh)	124.29	27.32	-8.27	12.97
	Kab. Deli Serdang (Sumatera Utara)	124.43	27.46	-10.28	12.68
	Kab. Padang Pariaman (Sumatera Barat)	124.56	100.25	-3.19	15.98
	Kab. Ogan Ilir (Sumatera Selatan)	124.15	28.95	-1.13	16.36
	Kab. Rokan Hulu (Riau)	123.73	26.99	6.64	17.08
	Kab. Karimun (Kepulauan Riau)	124.47	30.02	-1.05	17.96
	Kab. Lampung Selatan (Lampung)	124.45	27.33	9.47	13.39
	Kab. Kerinci (Jambi)	124.28	27.26	-11.13	12.01
	Kab. Bengkulu Utara (Bengkulu)	185.18	-21.48	12.37	15.62

Pulau Jawa	Kab. Klaten (Jawa Tengah)	124.40	27.56	3.35	16.53
	Kab. Magelang (Jawa Tengah)	124.39	27.59	13.69	16.34
	Kab. Semarang (Jawa Tengah)	124.40	27.65	-4.37	14.82
	Kab. Bekasi (Jawa Barat)	122.05	27.52	15.76	22.18
	Kab. Bogor (Jawa Barat)	124.59	27.16	8.33	21.20
	Kab. Sleman (D.I. Yogyakarta)	124.66	28.31	3.48	18.37
	Kab. Banyuwangi (Jawa Timur)	124.53	28.79	-0.92	16.83
	Kab. Malang (Jawa Timur)	124.40	27.46	2.35	14.20
	Kab. Kediri (Jawa Timur)	124.43	27.44	-2.38	14.33
	Kab. Tangerang (Banten)	124.63	27.80	12.07	16.09
Pulau Bali, NTT, NTB	Kab. Badung (Bali)	124.55	29.85	5.27	23.91
	Kab. Buleleng (Bali)	124.43	28.13	0.97	16.04
	Kab. Bima (NTB)	124.39	27.55	0.82	18.59
	Kab. Kupang (NTT)	125.60	27.36	5.75	21.71
Pulau Kalimantan	Kab. Ketapang (Kalimantan Barat)	134.83	26.29	6.50	18.03
	Kab. Banjar (Kalimantan Selatan)	124.31	27.28	-9.84	13.10
	Kab. Kapuas (Kalimantan Tengah)	124.22	27.24	-4.13	14.98
	Kab. Bulungan (Kalimantan Utara)	124.06	27.11	6.68	24.21
	Kab. Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur)	124.22	26.56	3.14	16.21
Pulau Sulawesi	Kab. Gowa (Sulawesi Selatan)	185.84	-21.46	58.28	18.44
	Kab. Poso (Sulawesi Tengah)	122.82	27.30	-0.45	16.59
	Kab. Wakatobi (Sulawesi Tenggara)	124.44	27.34	-5.36	15.66
	Kab. Minahasa (Sulawesi Utara)	124.35	27.52	-11.50	11.95
	Kab. Mamasa (Sulawesi Barat)	124.31	27.01	-3.89	16.36
Pulau Papua dan Maluku	Kab. Tolikara (Papua)	124.33	27.02	-10.11	14.80
	Kab. Merauke (Papua)	121.97	25.40	20.43	21.31
	Kab. Maluku Tengah (Maluku)	124.36	27.45	2.38	15.43

Sumber: Kementerian Desa PDTT ([www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id)), data diolah

Pembangunan Perdesaan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya



mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Dilihat dari pertumbuhan Dana Desa diatas, bahwasanya pertumbuhan Dana Desa pada tahun 2015 berdasarkan 36 kabupaten sampel maka terdapat 2 Kabupaten yang pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan Dana Desa tersebut. Untuk pulau Sumatera terdapat Kab. Bengkulu Utara yang mencapai 185% pertumbuhan Dana Desanya. Di Bengkulu Utara ini, sudah ada 70 desa yang memiliki BUMDes, dan 20 desa sudah mapan BUMDesnya. Efektifnya penggunaan Dana Desa di Kab. Bengkulu Utara ini dinilai dari Angka kemiskinan di Bengkulu Utara menurun dari 14,86 persen menjadi 11,06 persen pada tahun 2018. Kab. Gowa berada di Pulau Sulawesi merupakan kabupaten yang memperoleh pertumbuhan Dana Desa yang sama dengan Kab. Bengkulu Utara yaitu 185%. Dua kabupaten diatas memiliki Pertumbuhan Dana Desa yang sama. Berkat adanya Dana Desa, jalan penghubung antara desa sudah bisa terselesaikan. Sehingga mampu menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan di desa. Dengan adanya dana desa juga menumbuhkan keberadaan BUMDes yang menjadi tulang punggung ekonomi desa.

Pada tahun 2018, Kab. Gowa memiliki pertumbuhan Dana Desa 58% yang merupakan Kabupaten yang memperoleh pertumbuhan Dana Desa terbesar di seluruh Indonesia berdasarkan sampling kabupaten diatas. Dengan tata keuangan yang cukup baik maka pemerintah pusat cukup yakin memberikan Dana Desa yang besar terhadap provinsi tersebut. Kabupaten Gowa yang merupakan satu-satunya daerah di Pulau Sulawesi ini yang menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa

(Siskeudes) di 121 desa se-Kabupaten Gowa sejak tahun 2015 mampu mengelola penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Sedangkan Kab. Tolikara termasuk salah satu yang memiliki pertumbuhan Dana Desa yang -10% dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena banyaknya aparat desa yang menyalahgunakan Dana Desa tersebut. Kasus korupsi yang sering terjadi menyebabkan pemerintahan pusat mengurangi jatah Dana Desa untuk Kab. Tolikara, Papua.

Ada empat program prioritas percepat pertumbuhan ekonomi pedesaan untuk mendukung percepatan pembangunan desa sehingga dapat mendukung kualitas hidup masyarakat, Kemendes PDTT telah menetapkan empat program prioritas. Empat program tersebut yakni pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), membangun embung air desa, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan membangun Sarana Olahraga Desa (Raga Desa).

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi program prioritas unggulan dari Kemendes PDTT. BUMDes diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Dengan mengedepankan potensi unggulan di desanya, unit usaha BUMDes dapat terdiri dari berbagai jenis, seperti pengelola Desa Wisata, minimarket, penyewaan tenda dan kursi, pengelola daur ulang sampah, dan lainnya. Tiap desa diharapkan punya BUMDes dan menjadi sumber penghasilan desa. Nantinya dana desa bukan lagi jadi sumber utama pembangunan desa, tapi hanya stimulus.

Dalam tiga tahun terakhir, tercatat setidaknya terdapat lebih dari 20 BUMDes dengan penghasilan di atas Rp 300 juta. Empat posisi teratas diantaranya ditempati oleh BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Klaten, dengan omset mencapai Rp 10,3 Miliar. Kemudian disusul oleh BUMDes Tirtonirmolo di Desa

Tirtonirmolo, Bantul, BUMDes Mandala Giri Amerta di Desa Tajun, Buleleng, dan BUMDes Karangandri Sejahtera di Desa Karangandri, Cilacap.

Sementara itu, untuk mendukung kualitas hidup masyarakat Dana Desa dapat dimanfaatkan dalam pembangunan air bersih, MCK, unit Polindes, dan pembangunan drainase. Pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Dengan tingkat kualitas hidup masyarakat meningkat maka sumber daya manusia di wilayah pedesaan juga ikut meningkat. Sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

## 4.2 Analisis Model Ekonometrika Penelitian

### 4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk melihat frekuensi data independen dan dependen variabel data, serta sebaran data pada tingkat maksimum dan minimum dari data. Adapun hasil pengujian sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Statistik Deskriptif Model**

Date: 03/12/19 Time: 15:03				
Sample: 2015 2018				
	IPM	BD	DD	PDRB_PERK
Mean	68.94132	2.25E+12	1.37E+08	28086462
Median	68.90500	1.80E+12	1.23E+08	26467025
Maximum	83.71667	7.66E+12	4.07E+08	81324001
Minimum	46.38000	5.58E+11	12272922	1317986.
Std. Dev.	5.455619	1.47E+12	88085724	15914774
Skewness	-1.046240	1.830650	0.960619	1.086733
Kurtosis	8.612136	6.074875	3.504885	4.511530
Jarque-Bera	215.2473	137.1598	23.67640	42.05208

Probability	0.000000	0.000000	0.000007	0.000000
Sum	9927.550	3.24E+14	1.97E+10	4.04E+09
Sum Sq. Dev.	4256.220	3.09E+26	1.11E+18	3.62E+16
Observations	144	144	144	144

Sumber: *Eviews 10 dan diolah*

Dari hasil statistik deskriptif diatas, menunjukkan bahwasannya dalam rentang 2015-2018, nilai mean dari IPM Kabupaten berdasarkan sampling di Indonesia sebesar 68,94 artinya bahwa dalam pertahun Indeks Pembangunan Manusia bernilai 68,94 persen, sementara nilai mean dari variable BD (Belanja Daerah) sebesar 2,25 ini berarti dalam kurun waktu 4 tahun Belanja Daerah yang di berikan kepada Kabupaten di Indonesia sekitar 2,25 Triliun rupiah.

Adapun nilai mean variabel DD (Dana Desa) sebesar 1,37 artinya dalam kurun waktu 4 tahun nilai DD setiap Kabupaten sampling di Indonesia memiliki rata-rata 1,37 Milyar rupiah per tahun. Sementara nilai rata-rata dari variabel PDRB Per Kapita sebesar 28086462 ini berarti dalam kurun waktu 4 tahun PDRB Per Kapita kabupaten berdasarkan sampling di Indonesia memiliki rata-rata 28.086.462 Rupiah.

#### 4.2.2 Hasil Analisis Regresi

**Tabel 4.9**

#### **RINGKASAN HASIL PENGELOLAHAN DATA MODEL ESTIMASI**

Variabel	OLS ( <i>Ordinary Least Square</i> )	
	Model tanpa FEM	Model setelah FEM
DD	-1.93***	8.70***
	(-4.008343)	(9.559208)
PDRB_PERKAPITA	9.81***	5.61***
	(3.386087)	(5.133845)
BD	1.23***	-1.81*
	(3.657871)	(-0.232681)
Konstanta	66.07330	66.21417
	(66.59727)	(226.8830)

Num of Obs	144	144
Adj R-Squared	0.305025	0.992415
R ( <i>Correlatian</i> )	55.22%	99.62%
Uji-F	21.92089***	493.3521***
	(0.00000)	(0.00000)
D-W ( <i>Durbin-Watson</i> )	0.102235	1.606159

**Keterangan:** \*\*\* *Level of Signifikan*, \*\*\*1%, \*\*5%, \*10%;  
*Coefficient, (T Statistic).*

Sumber: *Eviews 10 dan diolah*

Dari hasil regresi pertama diatas, ditemukan terjadinya masalah autokorelasi dan variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sehingga diduga dengan perlu dilakukannya *Fixed Effect Model* (FEM). Ini biasanya digunakan pada situasi dimana suatu panel data dapat dipandang memiliki faktor tidak terobservasi yang memengaruhi variabel tak bebas yang bersifat konstan antarobservasi *cross section*. Dari hasil uji FEM diatas, dapat dilihat tidak ditemukannya masalah autokorelasi dan variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat. Penggunaan *fixed effect model* tetap meningkatkan kualitas regresi. Seluruh variabel penjelas (independen) mengalami peningkatan dampak pengaruh dan signifikansi statistik. Kelaikan suai (*good of fit*) model juga meningkatkan yang dilihat dari  $R^2$  dari 0,30 ke 0,99.

## A. Penaksiran

### 1) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berarti proporsi persentase variabel total dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) yang dijelaskan oleh variabel bebas (independen) secara bersama-sama. Berdasarkan model estimasi yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi IPM Kabupaten sampling se-Indonesia setelah dilakukan uji regresi dapat dilihat bahwa  $R^2$  adalah sebesar 99,24%, artinya secara bersama-sama variabel DD, PDRB

Per Kapita, BD memeberikan variasi penjelasan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan nilai 0,76% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk kedalam model estimasi atau berada pada *disturbance error term*.

## 2) Korelasi (R)

Dari hasil regres pada model estimasi variabel-variabel yang mempengaruhi IPM Kabupaten sampling se-Indonesia diperoleh nilai R sebesar 99,62%, artinya variabel bebas Dana Desa (DD), PDRB Per Kapita, Belanja Daerah (BD) dapat menjelaskan variabel terikat (IPM) secara signifikan.

Suatu variabel bebas dikatakan memiliki kekuatan hubungan yang positif terhadap variabel terikat apabila memiliki nilai koefisien bertanda positif dan bernilai 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) dan dikatakan signifikan apabila nilai *probability* dari variabel bebas tersebut lebih kecil dari 0,05 atau tingkat kesalahan  $\alpha 5\%$ .

## B. Interpretasi Hasil

Dari data yang telah diperoleh maka persamaan regresi berikut dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan hasil regresi *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai berikut:

$$IPM_{rt} = 66.21417 + 8.70 DD_{rt} + 5.61 PDRB \text{ Per Kapita}_{rt} + (-1.81) BD_{rt}$$

Dari hasil estimasi yang diperoleh dapat dibuat sebuah interpretasi model atau hipotesa yang diambil melalui regres ini, yaitu:

- a. Bahwa variabel DD (Dana Desa) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebab nilai koefisien variabel DD lebih besar ( $>$ ) dari  $\alpha$  5% yaitu 8.70. Artinya, apabila nilai DD (Milyar rupiah) dinaikkan sebesar 1 Milyar rupiah, maka akan meningkatkan nilai IPM sebesar 8.70% (*ceteris paribus*).
- b. Bahwa variabel PDRB Per Kapita mempunyai pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebab nilai koefisien variabel PDRB Per Kapita lebih besar ( $>$ ) dari  $\alpha$  5% yaitu 5.16. Artinya, apabila nilai PDRB Per Kapita (Jutaan rupiah) dinaikkan sebesar 1 Juta rupiah, maka akan meningkatkan nilai IPM sebesar 5.16% (*ceteris paribus*).
- c. Bahwa variabel BD (Belanja Desa) mempunyai pengaruh yang negative terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebab nilai koefisien variabel DD lebih kecil ( $<$ ) dari  $\alpha$  5% yaitu -1.81. Artinya, apabila nilai BD (Milyar rupiah) dinaikkan sebesar 1 Milyar rupiah, maka akan mengurangi nilai IPM sebesar 1.81% (*ceteris paribus*).

### **C. Konstanta dan Intersep**

Didalam hasil estimasi data dalam model regresi variabel-variabel yang mempengaruhi IPM Kabupaten sampling se-Indonesia, terdapat nilai konstanta sebesar 66.21417 yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten sampling se-Indonesia berkecenderungan naik ketika variabel penjelas tetap. Untuk interpretasi hasil regresi variabel independen, akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Dana Desa (DD)

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel DD adalah 8.70 dimana variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten sampling se-Indonesia. Hal ini menunjukkan  $t_{hitung} = 9.56$  dan nilai *probability* 0.0000 (dibawah  $\alpha$  5%). Hal menunjukkan bahwa hubungan DD dengan IPM Kabupaten sampling se-Indonesia adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai DD naik sebesar 1 Milyar rupiah maka IPM akan meningkat sebesar 8.70 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel DD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis di terima.

### 2) PDRB Per Kapita

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel PDRB Per Kapita adalah 5.61 dimana variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten sampling se-Indonesia. Hal ini menunjukkan  $t_{hitung} = 5.13$  dan nilai *probability* 0.0000 (dibawah  $\alpha$  5%). Hal menunjukkan bahwa hubungan PDRB Per Kapita dengan IPM Kabupaten sampling se-Indonesia adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai PDRB Per Kapita naik sebesar 1 Juta rupiah maka IPM akan meningkat sebesar 5.13 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel PDRB Per Kapita terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka



hipotesis di terima.

### 3) Belanja Daerah (BD)

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel BD adalah -1.81 dimana variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten sampling se-Indonesia. Hal ini menunjukkan  $t_{hitung} = -0.23$  dan nilai *probability* 0.8165 (diatas  $\alpha$  5%). Hal menunjukkan bahwa hubungan BD dengan IPM Kabupaten sampling se-Indonesia adalah negatif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai BD naik sebesar 1 Milyar rupiah maka IPM akan menurun sebesar 1.81 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel BD terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka hipotesis di tolak.

## D. Uji Statistik

### 1) Pengujian Signifikan Simultan (Uji-f)

Uji-f statistik bertujuan untuk pengujian signifikan semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen. Dari hasil regresi dengan menggunakan *fixed effect model* variabel DD (Dana Desa), PDRB Per Kapita, dan BD (Belanja Daerah) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten berdasarkan sampling se-Indonesia, maka nilai  $F_{tabel}$  sebesar 0.0000 (dibawah  $\alpha$  5%), sedangkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 493.35. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap dependen.

## 2) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji-t)

Uji-t statistik bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual terhadap nilai variabel dependen. Dari hasil regresi dengan menggunakan *fixed effect model* variabel DD (Dana Desa), PDRB Per Kapita, dan BD (Belanja Daerah) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten berdasarkan sampling se-Indonesia. Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai  $t_{\text{tabel}}$  yaitu:

Model:  $df (n) - k = 144 - 3 = 141$ ,  $\alpha = 5\%$  maka nilai  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,97

## E. Uji Asumsi Klasik

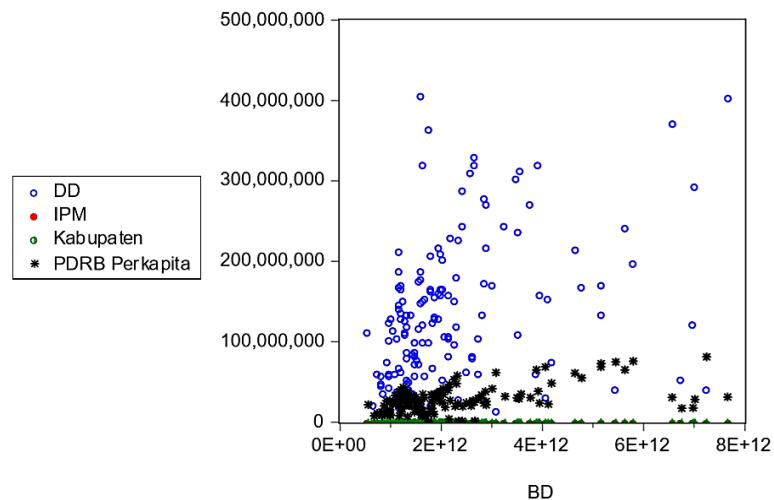
### 1) Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan terdapat adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Syarat model regresi yang baik adalah seharusnya terbebas dari multikolinearitas, dan dapat dilihat dari hasil analisa model tidak ada ditemukan multikolinearitas, karena tidak ada tanda koefisien yang berubah (sesuai dengan hipotesa). Ada beberapa variabel dependen yang tidak signifikan terhadap variabel terikat dalam uji parsial.

### 2) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisitas dan jika berbeda disebut

tidak heterokedastisidas. Model regresi yang baik adalah terbebas dari heterokedastisidas. Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisidas, dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan rasidualnya. Dasar analisis heterokedastisidas sebagai berikut:



**Gambar 4.4 Scatterplot Model**

*Sumber: Eviews 10 dan diolah*

Gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara berkelompok, membentuk pola garis lurus walaupun tidak sejajar serta atas, samping, dan bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas pada model estimasi.

### 3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji digunakan uji statistik *Durbin Watson* yaitu dengan cara melihat nilai (D-W) yang diperoleh.

Pada model estimasi yang dilakukan dengan uji FEM diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1.606159 artinya pada model digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Dikatakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi, dimana standar suatu model tidak terdapat masalah autokorelasi apabila  $D-W$  yang diperoleh  $1.54 < D-W < 2.46$ .

#### 4) Uji Hausman

Dari hasil uji *Fixed Effect Model* (FEM) maka diperoleh nilai *time-series random* sebesar 0.0000, nilai *probability*  $< 0.05$  maka model yang dipilih adalah *fixed effect*, disimpulkan bahwa *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *random effect*.

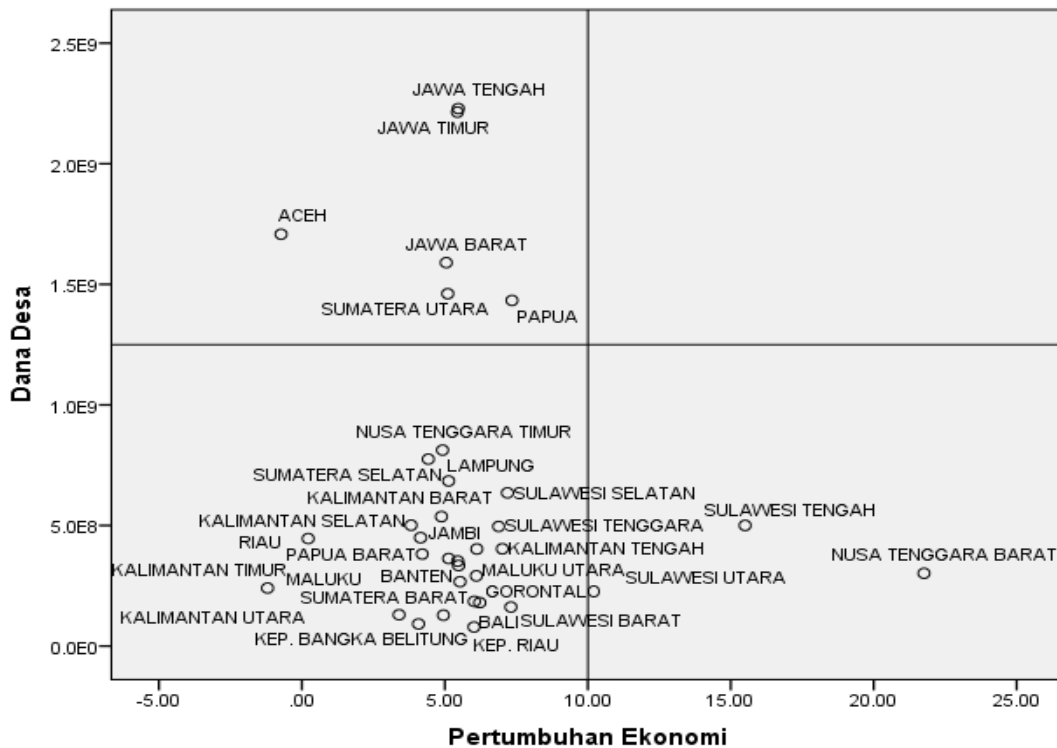
### 4.3 Analisis Tipologi Klassen

Tipologi klassen digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan nilai IPM. Tujuannya adalah melihat pemetaan Dana Desa dan kualitas pembangunan ekonomi Seluruh Provinsi di Indonesia.

#### 4.3.1 Analisis Tipologi Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Desa Tahun 2015

Untuk mengetahui klasifikasi daerah didasarkan kepada dua indikator utama yaitu Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi. Dengan menentukan total Dana Desa per Provinsi sebagai vertikal dan pertumbuhan ekonomi per Provinsi, sedangkan daerah per Provinsi dibagi menjadi empat golongan. Yaitu Provinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), Provinsi maju tapi pertumbuhannya lambat (*high income but low growth*), Provinsi yang berkembang cepat (*high growth but low income*) dan Provinsi yang relatif tertinggal (*low growth and low income*). Daerah yang diamati dalam penelitian ini merupakan provinsi

yang terdapat di Indonesia dengan pengklasifikasian menjadi empat kuadran, daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), maju tapi laju pertumbuhannya lambat (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) penerapan analisis ini dilakukan dengan menghitung total Dana Desa per Provinsi dan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2015.



**Gambar 4.5 Tipologi Klassen Pertumbuhan Ekonomi dengan Dana Desa**

*Sumber: SPSS dan diolah*

Berdasarkan hasil analisis tipologi kelas yang tertera pada gambar 4.2 diatas Indonesia terdiri dari 34 Provinsi dibagi dalam 4 kuadran berdasarkan total Dana Desa dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil per Provinsi pada tahun 2015 diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4.10**

**Tipologi Daerah Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Dana Desa  
Tahun 2015**

PDRB per kapita ( $y$ ) Laju Pertumbuhan ( $r$ )	$(y_i < y)$	$(y_i > y)$
$(r_i > r)$	Kuadran I:	Kuadran II: Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua
$(r_i < r)$	Kuadran III: Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan NTB	Kuadran IV: Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Riau, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat

*Sumber: SPSS dan diolah*

Kuadran I terdiri dari Provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mendapatkan Dana Desa yang besar, namun tidak ada Provinsi yang berada di kuadran I. Untuk di Kuadran II, terdapat provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Di kuadran II dapat dilihat bahwasannya sangat di kuasai oleh Pulau Jawa dan Sumatera, dikarenakan

tingginya Dana Desa yang diberikan pemerintah kepada dua pulau tersebut namun belum berdampak ke pertumbuhan ekonominya.

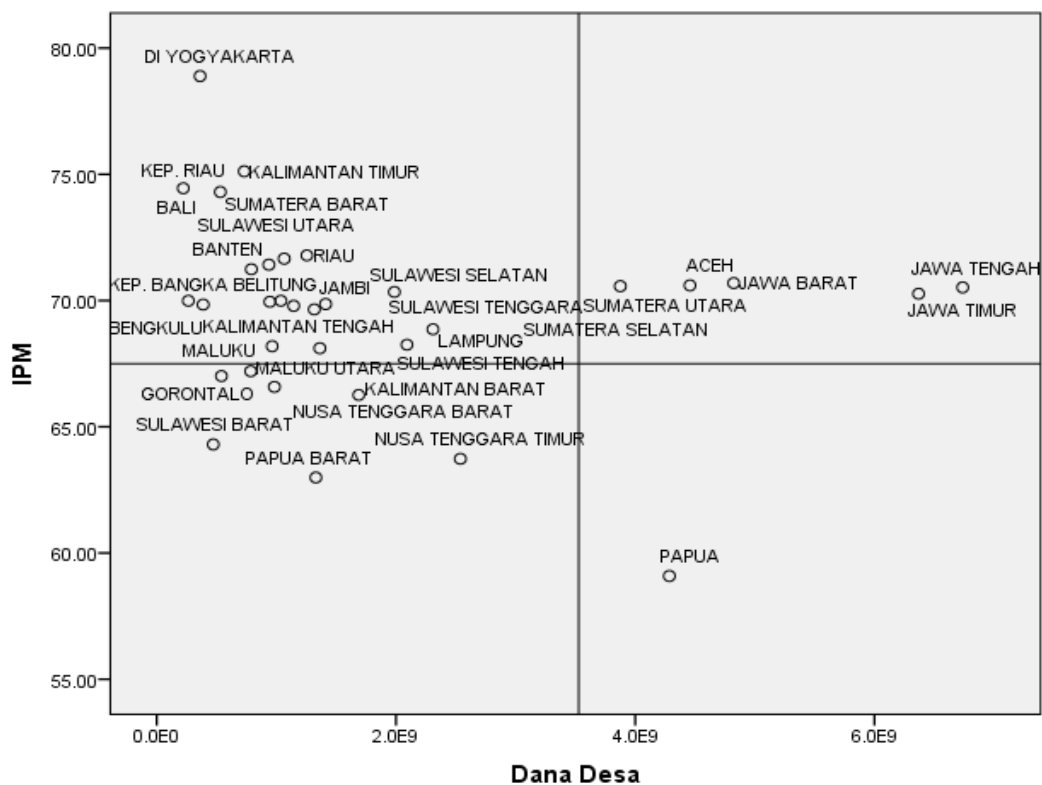
Sedangkan untuk provinsi yang pertumbuhan ekonominya berkembang dengan cepat Dana Desa yang tidak besar berada di Kuadran III yang terdiri dari: Sulawesi Tengah dan NTB. Tingginya pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut namun Dana Desa yang diberikan pemerintah hanya tidak sebanding dengan pulau Sumatera dan Jawa.

Dalam kuadran ke IV merupakan daerah provinsi yang relatif tertinggal yaitu daerah yang memiliki Dana Desa yang rendah dan juga pertumbuhan ekonominya rendah terdiri dari Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Riau, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

#### **4.3.2 Analisis Tipologi Klassen Dana Desa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Untuk mengetahui klasifikasi daerah didasarkan kepada dua indikator utama yaitu Dana Desa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan menentukan pertumbuhan IPM per Provinsi sebagai vertikal dan total Dana Desa per Provinsi, sedangkan daerah per Provinsi dibagi menjadi empat golongan. Yaitu Provinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), Provinsi maju tapi tertekan (*high income but low growth*), Provinsi yang berkembang cepat (*high growth but low income*) dan Provinsi yang relatif tertinggal (*low growth and low income*). Daerah yang diamati dalam penelitian ini merupakan

provinsi yang terdapat di Indonesia dengan pengklasifikasian menjadi empat kuadran, daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), maju tapi laju pertumbuhannya lambat (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) dan daerah yang relatif tertinggal (*low growth and low income*). Penerapan analisis ini dilakukan dengan menghitung total Dana Desa per Provinsi dan pertumbuhan IPM di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2018.



**Gambar 4.6 Tipologi Klassen Dana Desa dengan IPM**

*Sumber: SPSS dan diolah*

Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen yang tertera pada gambar 4.3 diatas Indonesia terdiri dari 34 Provinsi dibagi dalam 4 kuadran berdasarkan total Dana Desa dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil per Provinsi pada tahun 2018 diperoleh sebagai berikut:



**Tabel 4.11**

**Tipologi Daerah Berdasarkan Dana Desa dengan IPM Tahun 2018**

PDRB per kapita (y) Laju Pertumbuhan (r)	(y <sub>i</sub> < y)	(y <sub>i</sub> > y)
	(r <sub>i</sub> > r)	<p><b>Kuadran I:</b> Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur</p>
(r <sub>i</sub> < r)	<p><b>Kuadran III:</b> Papua</p>	<p><b>Kuadran IV:</b> NTB, NTT, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua Barat</p>

*Sumber: SPSS dan diolah*

Kuadran I terdiri dari Provinsi yang memiliki Dana Desa yang besar dan Pertumbuhan IPM tinggi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pertumbuhan dan perkembangan di pulau Jawa sangat cepat sehingga pulau Jawa sangat mendominasi di kuadran pertama.

Untuk di Kuadran II, provinsi yang Pertumbuhan IPM tinggi akan tetapi Dana Desa rendah yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kep.

Bangka Belitung, Kep. Riau, Bengkulu, Lampung, Banten, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku. Banyaknya provinsi yang mendapatkan Dana Desa yang rendah dikarenakan penyebaran Dana Desa berfokus ke Jawa dan Sumatera. DI Yogyakarta merupakan IPM tertinggi namun hanya sedikit mendapatkan Dana Desa, dikarenakan sedikitnya jumlah kabupaten di Provinsi tersebut dan DI Yogyakarta merupakan salah satu mendapatkan dana otonomi khusus dari pemerintah.

Sedangkan untuk provinsi yang Dana Desanya besar namun pertumbuhan ekonominya rendah berada di Kuadran III yaitu hanya Provinsi Papua. Provinsi Papua merupakan provinsi yang mendapatkan Dana Desa yang besar, dikarenakan rendahnya IPM di provinsi tersebut menyebabkan tingginya dana yang diberikan pemerintah untuk provinsi Papua.

Kuadran IV merupakan daerah provinsi yang tertinggal yaitu merupakan daerah yang laju pertumbuhan IPM rendah dan Dana Desa yang didapatkan juga rendah terdiri dari Provinsi NTB, NTT, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua Barat. Kuadran IV didominasi oleh Kawasan Timur Indonesia (KTI).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil regresi/estimasi yaitu pengaruh DD, PDRB Per Kapita, dan BD sebesar 99,44% sedangkan sisanya 0,56% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model estimasi, atau berada dalam *disturbance error term*. Secara bersama-sama variabel Dana Desa, PDRB Per Kapita, serta Belanja Daerah berpengaruh besar dalam pembentukan IPM.
2. Secara parsial variabel Dana Desa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembentukan IPM. Variabel PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan IPM. Serta variabel Belanja Daerah berpengaruh negatif namun signifikan terhadap pembentukan IPM. Belanja daerah berpengaruh negatif dikarenakan penggunaan belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dari kisaran 65% sampai 75%. Dari tahun ke tahun belanja pegawai terus meningkat akan tetapi dana untuk kepentingan pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat cukup rendah. Belum efektifnya penggunaan belanja daerah menyebabkan kurangnya dampak terhadap pembentukan IPM di wilayah kabupaten.
3. Besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Dana Desa yang setiap tahun meningkat, juga diikuti oleh peningkatan nilai kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Untuk itu, di pemerintahan Joko Widodo ini beliau mengeluarkan kebijakan berupa *nawacita* yang membangun Indonesia

dimulai dari daerah pinggiran atau desa. Sehingga tingkat kualitas hidup masyarakat di Indonesia dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi.

4. Melihat pemetaan Dana Desa dengan Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2015 menggunakan analisis tipologi klassen yaitu tidak adanya Provinsi yang berada pada kuadran pertama yang merupakan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan Dana Desa yang besar. Sedangkan untuk IPM dengan Dana Desa pada tahun 2018, Pulau Jawa yang terdiri dari Jawa Barat, Timur dan Tengah berada di kuadran pertama dengan IPM tinggi dan Dana Desa yang besar.

## **5.2 Saran**

1. Indeks Pembangunan Manusia meskipun tidak satu-satunya variabel ataupun sektor yang mendukung kualitas hidup, tetapi apabila Indeks Pembangunan Manusia berada dalam keadaan tingkat yang tinggi maka akan memberikan dampak yang positif juga pada tingkat kualitas hidup masyarakat. Pemerintah harus mengambil kebijakan Dana Desa yang tepat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat juga akan meningkat.
2. Setelah dilakukannya analisis Tipologi Klassen tersebut, dapat dilihat bahwa Kawasan Timur Indonesia masih dapat dikategorikan relative tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat melihat melakukan penyebaran Dana Desa yang ke daerah-daerah yang tertinggal bukan hanya yang berpusat di Pulau Jawa, melainkan daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah maupun tingkat kualitas hidup masyarakatnya yang rendah.

3. Belum meratanya penyebaran Dana Desa mengakibatkan terjadinya ketimpangan kualitas hidup di Indonesia. Pulau Jawa memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan diluar pulau Jawa. Untuk itu kebijakan Dana Desa yang sudah ada harus diperbaiki agar penyebaran Dana Desa merata untuk diluar pulau Jawa. Kurang paham dan kurang beraninya aparat desa untuk menggunakan Dana Desa menyebabkan tidak berjalannya program yang diharapkan pemerintah. Harus adanya pendamping desa yang dapat memberikan sosialisasi terhadap aparat desa agar dapat mengembangkan potensi desa yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Volume 7*, 1-34.
- Arifianto, W., & Setiyono, I. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 2-16.
- Aziz, N. L. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 193-211.
- Azwardi, & Abukosim. (2007). Pengelolaan Keuangan Pedesaan Dalam Mendorong Pembangunan Wilayah Pedesaan: Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 5*, Nomor 2.
- Bhinadi, A. (2003). Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan Luar Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8, 39 - 48.
- Boediono. (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Case, K. E., & Fair, R. C. (2008). *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Deiningner, K., & Pedro, O. (2000). Asset Distribution, Inequality, and Growth. *The World Bank*, 5-9.
- Gilarso, T. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Pengantar Makro* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ginting, C., Lubis, I., & Mahalli, K. (2008). Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Volume 5*.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometri Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hermawan, D. (2007). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Banten). *Institut Pertanian Bogor*, 11.
- Jhingan, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018. <http://www.kemenkeu.go.id>. (Diakses pada 30 November 2018).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Dana Desa Tahun 2015 - 2018. <http://www.kemenkeu.go.id>. (Diakses pada 2 Desember 2018).

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*.
- Kemendesa. (2016). *Data Desa, Data Daerah Tertinggal dan Tertentu, Data Transmigrasi*. <http://www.kemendesa.go.id>. (Diakses pada 2 Desember 2018).
- Kuncoro, H. (2007). Fenomena *Flypaper Effect* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *The 1st Accounting Conference Faculty of Economic Universitas Indonesia*, 1-29.
- Kuncoro, Mudrajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan*. (Edisi Pertama). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis* (Edisi Keempat). Yogyakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2015). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, D. (2009). Kemiskinan di Indonesia dan Solusinya. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, Volume 5*, 1-19.
- Mangkoesebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: BPFE.
- Manik, R. E., & Hidayat, P. (2010). Analisa Kualitas Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 49.
- Mankiw, N. G. (2007). *Macroeconomics*. Jakarta: Erlangga.
- Musgrave, Richard A, and Peggy Musgrave. (1984). *Public Finance in Theory and Practice*. New York. McGraw-Hill Inc.
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2002). *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Prok, K. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Selama Periode Otonomi Daerah 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 5*, 1-15.
- Rapanna, P., & Fajriah, Y. (2018). *Melawan Badai Ekonomi dalam Perspektif Kearifan Lokal*. Makassar: CV. Sah Media.

- Rochjadi, A. (2004). *Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah: Inter Governmental Fiscal Review*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Sanusi, B. (2004). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan* (Edisi kedua ed.). Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Suliswanto, M. S. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 8*, 357.
- Suyanto. (2009). Studi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia (*a study on the policy of decentralization in Indonesia*). *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis, volume 1*, 66-81.
- Sugiyono. (2011). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1* (Edisi Kesebelas). Jakarta: Erlangga.



# LAMPIRAN

**Rincian Total Belanja Daerah Berdasarkan Kabupaten Sampling Tahun 2015-2018**

<b>PROVINSI / KABUPATEN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kab. Aceh Barat Daya (Aceh)	871309775607	1342845673924	1049635904133	1131157175062
Kab. Deli Serdang (Sumatera Utara)	2735624354971	3529117634226	3497039137164	3766358253124
Kab. Padang Pariaman (Sumatera Barat)	1165716265828	1361586926339	1445716890974	1482950711581
Kab. Ogan Ilir (Sumatera Selatan)	964153853642	1218280615447	1614152966275	1547169950112
Kab. Rokan Hulu (Riau)	1373078183582	1498060479579	557974501637	1335400625178
Kab. Karimun (Kepulauan Riau)	989642700658	1345084375888	1261307054442	1452764856245
Kab. Lampung Selatan (Lampung)	1490080612986	2021817829670	1978103572445	2178641448999
Kab. Kerinci (Jambi)	917987331512	1188983229604	1173342758299	1180196910587
Kab. Bengkulu Utara (Bengkulu)	989349003888	1220446157841	1218336694990	1164366507247
Kab. Klaten (Jawa Tengah)	2077785996047	2423335408400	2590956004000	2656503142500
Kab. Magelang (Jawa Tengah)	1744730814566	2340396942410	2417344682330	2662575016000
Kab. Semarang (Jawa Tengah)	1669408310158	1953940400000	1999937106000	2132848624000
Kab. Bekasi (Jawa Barat)	3882237460467	5156508883424	5160869630637	5794424184791
Kab. Bogor (Jawa Barat)	1862982871234	7015437610000	6563220209000	7659448316000
Kab. Sleman (D.I. Yogyakarta)	2328751919925	2498770192801	2615343533863	2627296345926
Kab. Banyuwangi (Jawa Timur)	2741772556678	2802182876709	2873920422300	3009735899320
Kab. Malang (Jawa Timur)	3538236408639	3261552483564	3579233320717	3919235773458
Kab. Kediri (Jawa Timur)	2274442061439	2889596614737	2844521014041	2889969835129
Kab. Tangerang (Banten)	4179069902022	4775957504714	4643694102948	5630053487757
Kab. Badung (Bali)	3082032215561	4060564777588	5451343321972	7244394035811
Kab. Buleleng (Bali)	1865996555348	2155730961270	2145790807935	2159920047555
Kab. Bima (NTB)	1332703166398	1633794411344	1661934898548	1860108587437
Kab. Kupang (NTT)	992065739354	1500771816757	1273156102201	1400643868343
Kab. Ketapang (Kalimantan Barat)	1849286998873	1964161860797	2039881220123	1956035673596
Kab. Banjar (Kalimantan Selatan)	1572605925281	1800319581272	1811682424021	1605957148118
Kab. Kapuas (Kalimantan Tengah)	1484387529195	1896854538000	1800875599000	1982631000000
Kab. Bulungan (Kalimantan Utara)	1813326912946	1345029552936	1199944525127	1172210305833

Kab. Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur)	6755373055594	6980371046000	4117143128952	3944763060316
Kab. Gowa (Sulawesi Selatan)	1472120934355	1643415333277	1539541860443	1820955331817
Kab. Poso (Sulawesi Tengah)	1146037044531	1343559510551	1274018246933	1305617329585
Kab. Wakatobi (Sulawesi Tenggara)	676839830548	829380834624	736072701291	830768822531
Kab. Minahasa (Sulawesi Utara)	1092126832265	1333332719912	1210263593700	1253860648221
Kab. Mamasa (Sulawesi Barat)	827517250004	992072431791	997757786959	960706487514
Kab. Tolikara (Papua)	1173720667574	1655534652650	1606840665079	1748186755127
Kab. Merauke (Papua)	2039480776078	2302754192604	2255059916409	2318451779206
Kab. Maluku Tengah (Maluku)	1381150797844	1580058724250	1601137277000	1637498903000

**Rincian Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten Sampling  
Tahun 2015-2018**

<b>PROVINSI / KABUPATEN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kab. Aceh Barat Daya (Aceh)	63.77	64.57	65.09	65.80
Kab. Deli Serdang (Sumatera Utara)	72.79	73.51	73.94	74.56
Kab. Padang Pariaman (Sumatera Barat)	68.04	68.44	68.90	69.32
Kab. Ogan Ilir (Sumatera Selatan)	65.35	65.45	65.63	65.76
Kab. Rokan Hulu (Riau)	67.29	67.86	68.67	69.32
Kab. Karimun (Kepulauan Riau)	69.21	69.84	70.26	70.82
Kab. Lampung Selatan (Lampung)	65.22	66.19	66.95	67.85
Kab. Kerinci (Jambi)	68.89	69.68	70.03	70.67
Kab. Bengkulu Utara (Bengkulu)	67.46	67.63	67.80	67.97
Kab. Klaten (Jawa Tengah)	73.81	73.97	74.25	74.45
Kab. Magelang (Jawa Tengah)	67.13	67.85	68.39	69.05
Kab. Semarang (Jawa Tengah)	71.89	72.40	73.20	73.81
Kab. Bekasi (Jawa Barat)	71.19	71.83	72.63	73.32
Kab. Bogor (Jawa Barat)	67.77	68.32	69.13	69.77
Kab. Sleman (D.I. Yogyakarta)	81.20	82.15	82.85	83.72
Kab. Banyuwangi (Jawa Timur)	68.08	69.00	69.64	70.47
Kab. Malang (Jawa Timur)	66.63	67.51	68.47	69.38
Kab. Kediri (Jawa Timur)	68.91	69.87	70.47	71.31
Kab. Tangerang (Banten)	70.05	70.44	70.97	71.41
Kab. Badung (Bali)	78.86	79.80	80.54	81.41
Kab. Buleleng (Bali)	70.03	70.65	71.11	71.68
Kab. Bima (NTB)	63.48	64.15	65.01	65.74
Kab. Kupang (NTT)	62.04	62.39	62.79	63.16
Kab. Ketapang (Kalimantan Barat)	64.03	64.74	65.71	66.51
Kab. Banjar (Kalimantan Selatan)	66.39	66.87	67.77	68.39
Kab. Kapuas (Kalimantan Tengah)	66.07	66.98	68.04	69.00
Kab. Bulungan (Kalimantan Utara)	69.37	69.88	70.74	71.37
Kab. Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur)	71.78	72.19	72.75	73.21
Kab. Gowa (Sulawesi Selatan)	66.87	67.70	68.33	69.09
Kab. Poso (Sulawesi Tengah)	68.13	68.83	69.78	70.56
Kab. Wakatobi (Sulawesi Tenggara)	67.22	67.50	67.99	68.34
Kab. Minahasa (Sulawesi Utara)	73.59	74.37	74.59	75.18
Kab. Mamasa (Sulawesi Barat)	63.17	63.51	63.92	64.28
Kab. Tolikara (Papua)	46.38	47.11	47.89	48.64
Kab. Merauke (Papua)	67.75	68.09	68.64	69.05
Kab. Maluku Tengah (Maluku)	68.85	69.54	70.09	70.73

**Rincian PDRB Per Kapita Berdasarkan Kabupaten Sampling Tahun 2015 -  
2018**

<b>PROVINSI / KABUPATEN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kab. Aceh Barat (Aceh)	20125410	21098690	22153160	23294870
Kab. Deli Serdang (Sumatera Utara)	28932855	29837900	30136279	30437642
Kab. Padang Pariaman (Sumatera Barat)	25882000	28626000	28626000	30049001
Kab. Ogan Ilir (Sumatera Selatan)	12203539	12877954	13459814	13944037
Kab. Rokan Hulu (Riau)	20396000	20801000	21785000	22996000
Kab. Karimun (Kepulauan Riau)	27170000	28830000	30550000	32350000
Kab. Lampung Selatan (Lampung)	23398572	24654678	25910784	27166890
Kab. Kerinci (Jambi)	26666000	30109000	34151000	38075000
Kab. Bengkulu Utara (Bengkulu)	15270000	16680000	18310000	19970000
Kab. Klaten (Jawa Tengah)	18540000	19470000	20390000	24850313
Kab. Magelang (Jawa Tengah)	1317986	1393224	1446974	1509899
Kab. Semarang (Jawa Tengah)	30580000	33580000	36400000	39530000
Kab. Bekasi (Jawa Barat)	65128094	68641481	72880739	75799496
Kab. Bogor (Jawa Barat)	26120667	28376717	30788546	31153087
Kab. Sleman (D.I. Yogyakarta)	23140000	24070000	25050000	26780000
Kab. Banyuwangi (Jawa Timur)	29928700	33607000	37751300	41468200
Kab. Malang (Jawa Timur)	29022000	31940000	34942400	38227060
Kab. Kediri (Jawa Timur)	19715000	21362001	23701300	25769600
Kab. Tangerang (Banten)	48433320	54980937	60903914	64997396
Kab. Badung (Bali)	61495000	68833001	74947000	81324001
Kab. Buleleng (Bali)	34779910	3895120	42682840	46801100
Kab. Bima (NTB)	6996413	7800985	8712565	9624145
Kab. Kupang (NTT)	24769970	27819160	30315250	32285740
Kab. Ketapang (Kalimantan Barat)	31154502	32570954	34394988	36675119
Kab. Banjar (Kalimantan Selatan)	14940000	16370000	17570000	18450000
Kab. Kapuas (Kalimantan Tengah)	27823166	30906855	34210831	38327669
Kab. Bulungan (Kalimantan Utara)	25437274	25973858	27741277	26268049
Kab. Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur)	17392000	17818000	22375000	23661000

Kab. Gowa (Sulawesi Selatan)	12310000	13740000	15380000	16920000
Kab. Poso (Sulawesi Tengah)	28650586	31114081	33789399	36694753
Kab. Wakatobi (Sulawesi Tenggara)	7608420	9832562	11118743	12496106
Kab. Minahasa (Sulawesi Utara)	33125322	36611530	40080485	43146766
Kab. Mamasa (Sulawesi Barat)	8299251	8562045	9554516	10440908
Kab. Tolikara (Papua)	7985070	8593098	9225042	9860722
Kab. Merauke (Papua)	41682788	47811024	53042932	57702339
Kab. Maluku Tengah (Maluku)	20763280	23332560	26234070	34986970

### Rincian Dana Desa Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018

<b>PROVINSI</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Aceh	1707817995	3829751986	4892571795	4457512950
Bali	185428984	416264690	537258505	531141963
Banten	352516368	791252019	1009506961	937180879
Bengkulu	362962239	813896546	1035340413	945638279
Di Yogyakarta	128076618	287695629	368567559	361894397
Gorontalo	179957839	403677978	513958123	540591708
Jambi	381560156	856771029	1090942601	1037674061
Jawa Barat	1589711596	3568437985	4547513838	4823095418
Jawa Tengah	2228889296	5002426341	6384442058	6737083091
Jawa Timur	2214014855	4969123651	6339556181	6368745359
Kalimantan Barat	537066678	1241607506	1616725259	1688279973
Kalimantan Selatan	501119950	1125244835	1430375412	1316573429
Kalimantan Tengah	403351015	904370668	1148904929	1144586424
Kalimantan Timur	240542413	540759158	692420247	730928055
Kalimantan Utara	129874894	291096987	369938349	387688280
Kepulauan Bangka Belitung	91927560	206293612	261661579	264571725
Kepulauan Riau	79199724	177766079	228182536	221500941
Lampung	684727653	1536762050	1957487721	2091398105
Maluku	334004517	754638987	961602798	964700076
Maluku Utara	291071202	653455314	832406416	785606677
NTB	301797520	677494427	865014066	983185878
NTT	812875565	1849353802	2360353320	2537837576
Papua	1433226742	3385116457	4300947518	4284844848
Papua Barat	449326962	1074690239	1364412395	1329719076
Riau	445646965	999278616	1269305925	1254688851
Sulawesi Barat	162019634	363558153	461094687	472270192
Sulawesi Selatan	635355795	1425595011	1820518240	1986216686
Sulawesi Tengah	500301180	1124644395	1433826019	1363158368
Sulawesi Tenggara	496077234	1126867317	1482032772	1411237132
Sulawesi Utara	402546360	911498499	1161358872	1065411508
Sumatera Barat	267003839	598637609	796538971	790787312
Sumatera Selatan	775043818	1780769519	2267261445	2309392954
Sumatera Utara	1461156834	3293282206	4197972490	3874857829
<b>TOTAL NASIONAL</b>	<b>20766200000</b>	<b>46982080000</b>	<b>60000000000</b>	<b>60000000000</b>

## Regresi Berganda Model

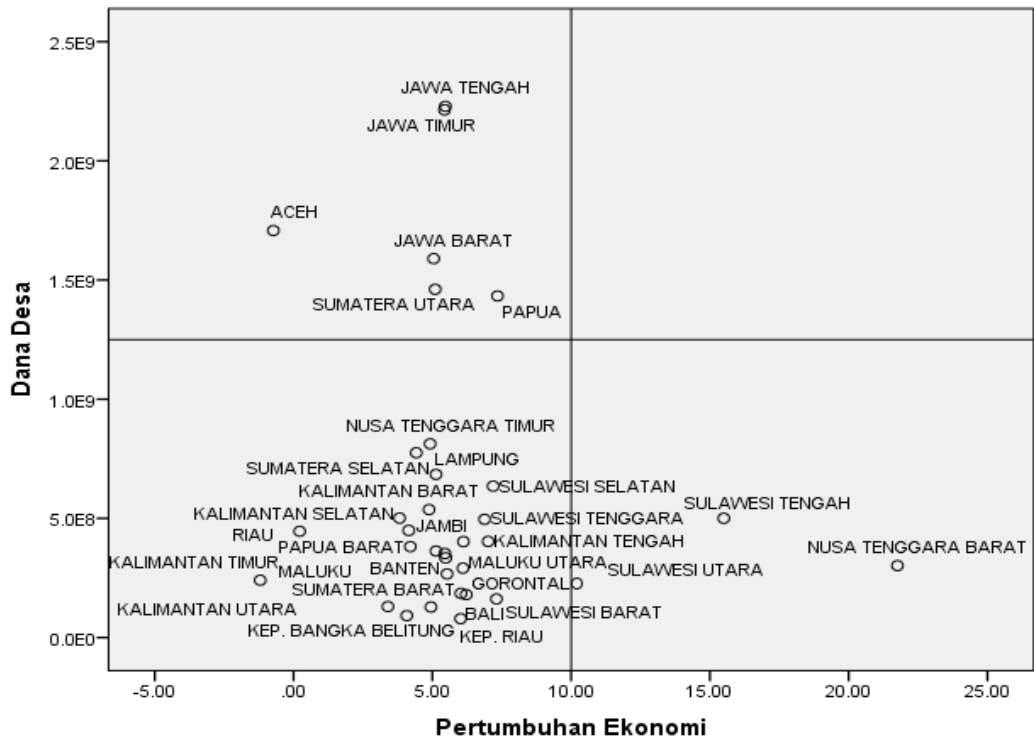
Dependent Variable: IPM Method: Panel Least Squares Date: 03/12/19 Time: 07:11 Sample: 2015 2018 Periods included: 4 Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 144				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.07330	0.992132	66.59727	0.0000
DD	-1.93E-08	4.82E-09	-4.008343	0.0001
PDRB_PERKAPITA	9.81E-08	2.90E-08	3.386087	0.0009
BD	1.23E-12	3.35E-13	3.657871	0.0004
R-squared	0.319604	Mean dependent var	68.94132	
Adjusted R-squared	0.305025	S.D. dependent var	5.455619	
S.E. of regression	4.548087	Akaike info criterion	5.894675	
Sum squared resid	2895.913	Schwarz criterion	5.977170	
Log likelihood	-420.4166	Hannan-Quinn criter.	5.928196	
F-statistic	21.92089	Durbin-Watson stat	0.102235	
Prob(F-statistic)	0.000000			



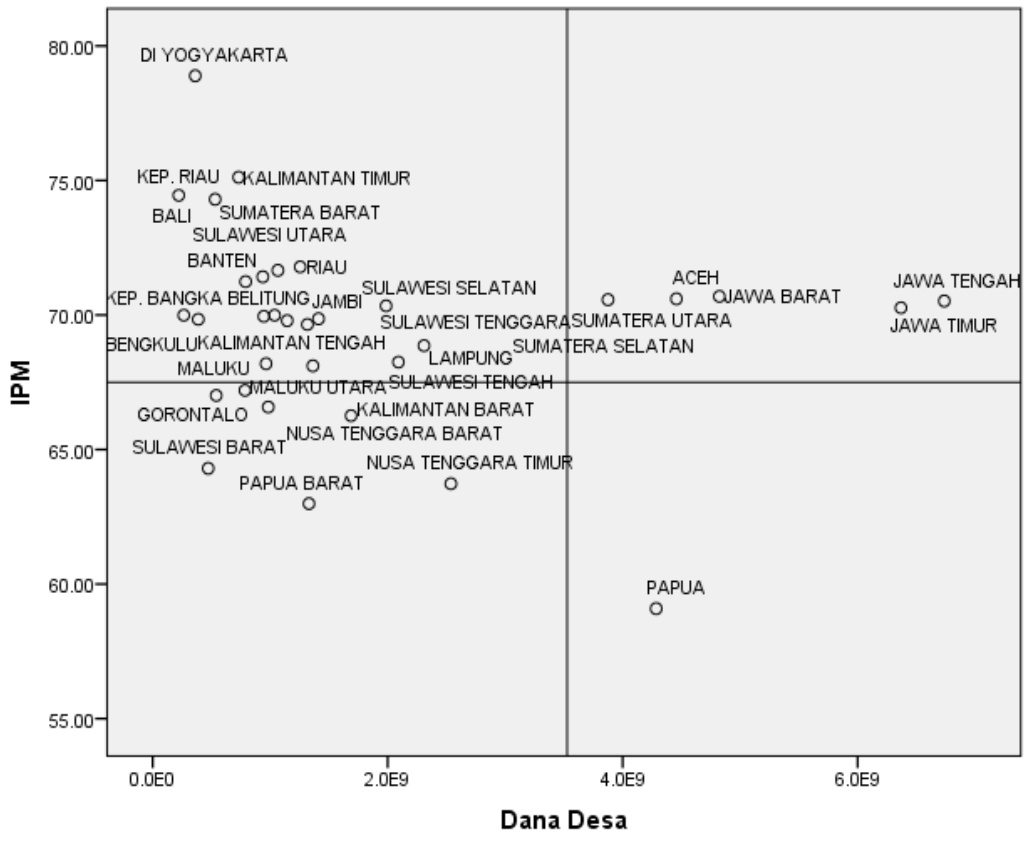
**Fixed Effect Model (FEM)**

Dependent Variable: IPM Method: Panel Least Squares Date: 03/12/19 Time: 14:54 Sample: 2015 2018 Periods included: 4 Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 144				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.21417	0.291843	226.8830	0.0000
DD	8.70E-09	9.10E-10	9.559208	0.0000
PDRB_PERKAPITA	5.61E-08	1.09E-08	5.133845	0.0000
BD	-1.81E-14	7.76E-14	-0.232681	0.8165
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.994430	Mean dependent var		68.94132
Adjusted R-squared	0.992415	S.D. dependent var		5.455619
S.E. of regression	0.475148	Akaike info criterion		1.575433
Sum squared resid	23.70539	Schwarz criterion		2.379757
Log likelihood	-74.43118	Hannan-Quinn criter.		1.902265
F-statistic	493.3521	Durbin-Watson stat		1.606159
Prob(F-statistic)	0.000000			

### Tipologi Klassen Pertumbuhan Ekonomi dengan Dana Desa



### Tipologi Klassen Dana Desa Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SHIHABUDDIN FUADY RANGKUTI  
NPM : 1505180069  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP  
PENGEMBANGAN EKONOMI UNTUK Mendukung  
KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DI INDONESIA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
14/2 2019	Buat Gambar Umum tjd Par kemb. Dana Desa di abad ke-IV		
21/2 2019	Bab IV Pembahasan sesuai ken dgn struktur yg telah dibuat dan rumus yg Data.		
28/2 2019	Data yg sampai kas (66) hs diteliti dgn data. sesuai dgn Def-oprns		
5/3 - 2019	Mem Data gunakan Panel Data. Hsl ds nya Menh tllh BLUE hs ditrean.		
13/3 - 2019	Model di Treatment dan Fixed Effect yg diujikan dgn model		
15/3 - 2019	Sdh kudu all rumus krp 4/ di bidan Mya Hyun. (Uran Akhur).		

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, Maret 2019  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

---

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 30/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/8/11/2018

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 8/11/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Shihabuddin Fuady Rangkuti  
NPM : 1505180069  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : -

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : -

Rencana Judul : 1. Evaluasi kebijakan Dana Desa terhadap perkembangan ekonomi dalam mendukung kualitas hidup masyarakat di Indonesia  
2. -  
3. -

Objek/Lokasi Penelitian : -

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Pemohon

(Shihabuddin Fuady Rangkuti)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 30/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/8/11/2018


Nama Mahasiswa : Shihabuddin Fuady Rangkuti  
NPM : 1505180069  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : -  
Tanggal Pengajuan Judul : 8/11/2018  
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor 270/12/EP/18, atau;  
Alternatif judul lainnya..... (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
Nama Dosen pembimbing : Prawidya Hariani RS (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : ..... (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)  
..... (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

  
(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, .....

Dosen Pembimbing

  
(.....)



**BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**

Pada hari ini **SHIHABUDDIN FUADY RANGKUTI** tanggal Selasa, 08 Januari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan **SHIHABUDDIN FUADY RANGKUTI** menerangkan bahwa :

**N a m a** : SHIHABUDDIN FUADY RANGKUTI  
**N .P.M.** : 1505180069  
**Tempat / Tgl.Lahir** : Medan, 23 Oktober 1997  
**Alamat Rumah** : Dusun VII Tembung Sei Rotan  
**JudulProposal** :EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI UNTUK MENDUKUNG KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DI INDONESIA

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	.....
Bab II	.....
Bab III	.....
Lainnya	.....
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Selasa, 08 Januari 2019

**TIM SEMINAR**

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS., S.E., M.Si.

Pembimbing

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembanding

Dra.Hj.LAILAN SAFINA, M.Si.





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



### PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 08 Januari 2019* menerangkan bahwa:

Nama : SHIHABUDDIN FUADY RANGKUTI  
N .P.M. : 1505180069  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 23 Oktober 1997  
Alamat Rumah : Dusun VII Tembung Sei Rotan  
JudulProposal :EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI UNTUK Mendukung Kualitas HIDUP MASYARAKAT DI INDONESIA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE.,M.Si.*

Medan,Selasa, 08 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE., M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembimbing

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE.,M.Si.

Pembanding

Dra.Hj.LAILAN SAFINA,M.Si.

Diketahui / Disetujui  
A.n. Dekan  
Wakil Dekan - I

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Shihabuddin Fuady Rangkuti  
NPM : 1505180069  
Konsentrasi : -  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (~~Akuntansi/Perpajakan/Manajemen~~/Ekonomi  
Pembangunan)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

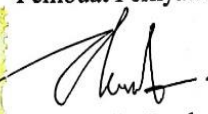
Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 04 – 01 - 2019

Pembuat Pernyataan



  
Shihabuddin Fuady Rangkuti

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 82-12-TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

**Program Studi : Ekonomi Pembangunan**  
**Pada Tanggal : 10 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

**Nama : SHIHABUDDIN FUADY RANGKUTI**  
**N P M : 1505180069**  
**Semester : VII (Tujuh)**  
**Program Studi : Ekonomi Pembangunan**  
**Judul Proposal / Skripsi : Evaluasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Untuk Mendukung Kaulitas Hidup Masyarakat Di Indonesia**

**Dosen Pembimbing : Dr.PRAWIDYA HARIANI RS.,SE.,M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 10 Desember 2019**
4. Revisi Judul.....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 01 Rabiul Akhir 1440 H  
10 Desember 2018 M

Dekan   
  
**H. JANURI, SE., MM., M.Si.**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.